



BORANG EVALUASI DIRI



PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDIN

2019

IDENTITAS PROGRAM STUDI

Nama Perguruan Tinggi : **Universitas Hasanuddin**
Nama Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Perintis
KM 10, Makassar. Kode Pos: 90245
Nomor Telepon : 0411-584002, 586200
Nomor Faksimili : 0411-585188
Homepage dan E-Mail : <http://www.unhas.ac.id>
Nomor dan Tanggal SK
Pendirian Institusi : SK Dirjen Dikti Depdikbud Nomor: 591/DIKTI/Kep/1993
Pejabat yang Menerbitkan SK : Dirjen Dikti Depdikbud

Identitas berikut ini mengenai Fakultas Hukum dari Universitas Hasanuddin :

Nama Fakultas : Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Perintis
KM 10, Makassar. Kode Pos: 90245
Nomor Telepon/Faksmili : 0411-587219
Homepage dan E-Mail : Hukum@unhas.ac.id
Nomor dan Tanggal
SK Pendirian Fakultas : Surat Keputusan Menteri P dan K
Nomor 3399/kab
Pejabat yang Berwenang : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Program Studi yang Dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin :

1. PS Ilmu Hukum : (Jenjang pendidikan S1)
2. PS Hukum Adm. Negara : (Jenjang pendidikan S1)
3. PS Magister Ilmu Hukum : (Jenjang pendidikan S2)
4. PS Magister Kenotariatan : (Jenjang pendidikan S2)
5. PS Doktor Ilmu Hukum : (Jenjang pendidikan S3)

Peringkat (Nilai) Akreditasi :

Terakhir : **A**
Nomor SK BAN-PT : 417/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2014

Alamat PS : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10
Makassar-90245
Nomor Telepon PS : 0411-587219
Nomor Faksimili PS : 0411-587219
Homepage dan E-Mail : hukum@unhas.ac.id

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Dengan mendasarkan pada Jati diri, visi, misi, dan tujuan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin pada intinya adalah menjadi Program Studi yang handal, kredibel yang ditunjang dengan semangat benua kemartiman. Maka disusunlah visi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu : "Program studi ilmu hukum unggulan, dengan lulusan berbudaya, bermoralitas tinggi dan berdaya saing secara nasional dan internasional berbasis benua maritim pada tahun 2018".

Visi tersebut sangat realistik dan spesifik, selain dapat diwujudkan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, tentunya tidak hanya dalam makna menghasilkan luaran Magister Hukum yang berkualitas, tetapi juga sangat professional, humanistis memiliki daya saing yang tinggi serta berbudi pekerti yang luhur.

Saat ini, Program Studi Magister Ilmu Hukum unhas memiliki 61 Dosen yang keseluruhannya telah bergelar Doktor Ilmu Hukum. Dari keseluruhan pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum tersebut, 31 diantaranya telah berstatus Guru Besar,. Selain itu juga ditunjang staf sebanyak 33, tenaga pustakawan sebanyak 43 orang, tenaga laboratorium/teknis sebanyak 5 orang.

Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan kompetensi lainnya yang mendukung tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi.

Prasarana dan sarana perkuliahan sangat memadai dan semuanya sangat terawat, yang juga sudah ditunjang oleh media pembelajaran yang canggih dan Online (LCD, Wifi, E-Learning, Video Conference, dan Internet). Sistem pemeliharaan (*maintenance*) prasarana, sarana dan media pembelajaran dan telah mendapatkan perhatian dengan menentukan petugas tersendiri serta *cleaning service* yang permanen. Pendanaan kegiatan PS bersumber dari DIPA yang terdiri atas anggaran rutin dan SPP, hibah dan dana kerjasama. Sejak Tahun 2004, Prodi memperoleh tambahan dana pengembangan dari Program Hibah Kompetensi (SP4) dan PHKI Tahun 2011-2015, serta Dana Kemitraan lainnya.

Program Studi ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang diterbitkan oleh universitas maupun fakultas. Peraturan tersebut masih perlu dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP), karena unit pelaksana akademik Prodi sebelumnya diwadahi oleh Jurusan yang telah menjadi Bagian. Perubahan Jurusan menjadi Bagian membawa konsekuensi pengelolaan program berada di bawah fakultas, Dekan secara *ex officio* bertindak selaku ketua Prodi khususnya untuk Program Sarjana. Sejak Tahun 2010 sejalan dengan kebijakan yang diterapkan pada tingkat universitas, sejak itu Dekan Fakultas yang mengelola program monodisipliner mengelola program studi Magister Ilmu Hukum (S2) dan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) yang dulunya dibawah kendali pengelolaan Program Pascasarjana (PPS) Universitas Hasanuddin.

Sejak Tahun 2010 kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Prodi Starata 1, 2, dan 3 berada pada Pimpinan Fakultas bersama jajarannya, sehingga Senat dan Bagian-bagian, program studi Magister Ilmu Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum dilibatkan dalam memberikan pertimbangan pengelolaan Program Studi Sarjana, dan saling memerikan kontribusi pengembangan karena sudah dalam satu atap pengelolaan.

Mengenai pelacakan lulusan telah dilaksanakan secara optimal, cara yang paling mudah dilakukan adalah melalui pendekatan angkatan yang semuanya memiliki ikatan atau paguyuban yang secara rutin melakukan pertemuan, dan bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran di Fakultas Hukum Unhas, terutama dalam memberikan informasi kualitas lulusan dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan stakeholders.

Relevan dengan pelacakan lulusan tersebut pada setiap tahunnya berlangsung secara optimal, selain dilakukan pelacakan mengenai tempat lulusan berkiprah, juga dilakukan pendataan mengenai kesesuaian keahlian hukum dengan tempat mereka berkerja. Sehubungan dengan daya serap lulusan Prodi ini dengan dunia kerja, secara umum didapatkan gambaran yang sangat baik. Hal ini relevan dengan data kelulusan selama 5 tahun terakhir dengan nilai-nilai Indeks Prestasi Kumulatif 3,80 (tiga koma delapan puluh).

Memperhatikan kualitas lulusan yang sangat optimal tersebut merupakan dampak langsung penerapan sistem pembelajaran yang diterapkan dalam lingkungan Universitas Hasanuddin, yaitu sistem yang berbasis pada kompetensi yang didukung dengan metoda pembelajaran yang berbasis pada Student Centre Learning (SCL). Peran serta semua elemen bangsa dalam memberikan kontribusi menuju pola pembelajaran yang efektif dan responsif senantiasa menjadi perhatian pimpinan Prodi bersama jajarannya.

Program sosialisasi sistem pembelajaran dengan metoda *Student Centre Learning (SCL)*, telah menjadi program rutin dan wajib dilaksanakan pada setiap tahunnya dalam setiap penerimaan mahasiswa baru yang dilanjutkan dengan kegiatan *Basic Learning Skill Character And Creativity (BALANCE)*. Disamping untuk meningkatkan soft skill para dosen secara bergilir dan terprogram diikuti dalam Pelatihan Pembelajaran berpola

Student Centre Learning. Melalui program yang demikian itu sangat mendukung proses pembelajaran yang optimal dan berkualitas. Untuk itu, dosen juga diikuti dalam berbagai pelatihan, penataran, kursus singkat dan kegiatan lain untuk meningkatkan kompetensinya termasuk mengikuti *shotcourse* dan lainnya di luar negeri.

Penciptaan suasana akademik telah dibangun dengan meningkatkan interaksi yang harmonis antar civitas akademika melalui kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler, serta pelibatan secara timbal balik pada setiap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Upaya ini mengandalkan peran dosen muda karena sebahagian dosen senior agar lebih fokus terhadap proses pembelajaran di fakultas dan semakin menumbuhkan rasa tanggung jawabnya terhadap kualitas lulusan di Prodi.

Sistem informasi yang berbasis IT telah disediakan secara maksimal yang dapat diakses oleh civitas akademika, para alumni dan stakeholders. Jaringan Online dapat dilakukan tanpa batas dalam rangka peningkatan proses pembelajaran, baik yang didukung oleh fasilitas Wi-Fi, Hotspot, Website, dan lainnya, maupun yang dipersiapkan tersendiri oleh Prodi untuk kepentingan proses pembelajaran yang efektif dan multimedia.

Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan melalui prosedur yang ditetapkan oleh universitas dan fakultas. Di tingkat fakultas, selain ditetapkan tim untuk melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan akademik secara terbuka dan terprogram juga dibentuk Komisi Penilai Judul Skripsi dalam penyusunan tugas akhir mahasiswa untuk mencegah terjadinya plagiat. Untuk menilai hasil belajar diberikan *Academic Record* bagi setiap mahasiswa. Prestasi setiap lulusan ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) matakuliah yang dilulusi. Hal ini menghasilkan peringkat yudisium memuaskan, sangat memuaskan, atau *cum laude*.

Publikasi karya ilmiah dosen juga telah berlangsung secara optimal demikian pula untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat sangat memadai.

Penelitian masih perlu ditingkatkan melalui pembiayaan lembaga mitra, terutama instansi terkait dengan pembentukan, pembinaan dan penegakan hukum. Pelibatan lembaga mitra sangat dibutuhkan mengingat pembiayaan yang mampu ditanggulangi oleh universitas atau fakultas yang sudah memadai.

Lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum menyebar mengabdikan diri di berbagai instansi dalam dan luar negeri. Mereka dipercaya menempati posisi penting di pemerintahan, swasta, organisasi politik dan kemasyarakatan. Demikian pula banyak yang sukses menjalani profesi hukum sebagai advokat, jaksa, hakim dan polisi. Keunggulan lulusan disebabkan intensnya pembekalan kompetensi dasar yang diperoleh pada waktu menempuh pendidikan.

Makassar, 25 Maret 2019
Program Studi Magister Ilmu Hukum FH-UH
Ketua,

Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.
NIP. 197007081994121001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	i
IDENTITAS PROGRAM STUDI	ii
RANGKUMAN EKSEKUTIF	iii
IDENTITAS PENGISI PROGRAM STUDI	viii
DAFTAR ISI	ix
KOMPONEN A :	
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI PENCAPAIANNYA	1
KOMPONEN B:	
TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU	9
KOMPONEN C:	
MAHASISWA DAN LULUSAN	24
KOMPONEN D:	
SUMBER DAYA MANUSIA.....	38
KOMPONEN E:	
KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK	46
KOMPONEN F:	
PENDANAAN, SARANA, PRASARANA DAN SISTEM INFORMASI	55
KOMPONEN G:	
PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA.....	65
ANALISIS SWOT ANTAR KOMPONEN	70
REFERENSI	74

DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN

KOMPONEN A

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaiannya

Visi Program Studi Magister Ilmu Hukum, yaitu : ” **Program studi ilmu hukum unggulan, dengan lulusan berbudaya, bermoralitas tinggi dan berdaya saing secara nasional dan internasional berbasis benua maritim pada tahun 2023**”.

Visi Program Studi Magister Ilmu Hukum ini merupakan devirasi substantif dari Visi Universitas Hasanuddin, yaitu “Pusat Unggulan dalam Pengembangan Insani, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya Berbasis Benua Maritim Indonesia. Visi tersebut sangat realistik dan spesifik, kurun waktu pencapaiannya mengikuti Renstra Unhas 2016-2020. Dengan komitmen untuk menghasilkan lulusan Magister ilmu hukum yang berkualitas, profesional, bermoralitas tinggi, humanis, memiliki daya saing tinggi baik secara nasional maupun internasional.

2. Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum

Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin adalah:

Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin adalah:

- a. Mengembangkan profesionalitas dan intelektualitas di bidang ilmu hukum melalui proses pembelajaran yang berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- b. Mengembangkan program studi ilmu hukum melalui penelitian unggulan dalam bidang ilmu hukum (*excellent research in legal science*).

- c. Mengembangkan program studi ilmu hukum sebagai ujung tombak pengembangan ilmu hukum dalam rangka mewujudkan universitas berkelas dunia (*world class university*).

3. Sasaran Program Studi

Sasaran Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah:

- a. Lulusan magister ilmu hukum yang kreatif, inovatif, dan arif sehingga dapat mengembangkan ilmu hukum yang sesuai dengan perkembangan hukum terkini dan global.
- b. Lulusan magister ilmu hukum menghasilkan penelitian yang dapat dipublikasikan pada jurnal-jurnal yang terakreditasi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, sehingga dapat memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang hukum.
- c. Lulusan magister ilmu hukum memiliki kemampuan, dan kemahiran analisis, sintesis, dan evaluasi di bidang ilmu hukum yang diwarnai nilai-nilai berpikir dan bertindak dalam bingkai moralitas keilmuan.
- d. Lulusan magister ilmu hukum memiliki hasil-hasil penelitian yang mendukung peningkatan daya saing bangsa dan memperkuat reaktualisasi nilai-nilai berpikir, berperilaku, bertindak, dan bermoral.

4. Tujuan Program Studi

Tujuan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin adalah sebagai berikut:

Tujuan Umum:

1. Memiliki kemampuan berpikir kritis, akademis, serta mampu melakukan penelitian yang menunjang pengembangan teori.
2. Memiliki kemampuan meningkatkan pelayanan profesional melalui penelitian dan pengembangan ilmu hukum.
3. Memiliki kemampuan mengembangkan profesi dalam spektrum yang lebih luas dalam ilmu maupun antar profesi.

- Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dalam masyarakat, dan dengan penalaran ilmiahnya dapat mengajukan alternatif pemecahan masalah.

Tujuan Khusus:

- Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan teoritis-praktis yang luas dan mendalam mengenai hukum keperdataan, hukum pidana, hukum tata negara, hukum kesehatan, hukum internasional, serta hukum agraria yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek hukum, sosial, politik, filosofi, lingkungan, pembangunan, maupun aspek lainnya.
- Menghasilkan lulusan yang mampu mengidentifikasi masalah hukum keperdataan, hukum pidana, hukum tata negara, hukum kesehatan, hukum internasional, serta hukum agraria yang sejalan dengan segala perkembangan hukum, mengajukan konsep-konsep ilmiah, baik yang merupakan alternatif pemecahan masalah maupun yang menyangkut pengembangan hukum keperdataan, hukum pidana, hukum tata negara, hukum kesehatan, hukum internasional, serta hukum agraria.

5. Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian tujuan program studi dilaksanakan dengan menetapkan tujuh sasaran pokok sebagai berikut:

Sasaran:	Strategi Pencapaian:
1. <i>Pengembangan integritas dan jati diri program studi menjadi institusi terkemuka dan unggulan.</i>	(1) Berupaya mengembangkan jati diri Magister S2 Ilmu Hukum sebagai institusi yang terkemuka dalam pengembangan ilmu hukum dan peningkatan kompetensi atau keahlian (profesional) bidang hukum. (2) Memperkokoh jati diri dan profil prodi ilmu hukum pada tataran nasional dan internasional terutama dalam penguasaan, pembelajaran, dan penelitian baik secara nasional dan internasional. (3) Sebagai penopang utama Universitas Hasanuddin dalam pencapaian kualifikasi World Class University, sekaligus membangun posisi sebagai fakultas paling terkemuka dan unggulan di Indonesia

<p>2. <i>Pengembangan mutu kemahasiswaan</i></p>	<p>(1) Meningkatkan mutu akademik mahasiswa dengan pemutakhiran teori dan konsep-konsep hukum yang terus berkembang sebagai bekal keahlian profesionalnya.</p> <p>(2) Meningkatkan mutu karya ilmiah mahasiswa, khususnya karya-karya tulis antara serta karya akhir berupa tesis mahasiswa.</p> <p>(3) Meningkatkan mutu karya aplikatif mahasiswa dalam bidang hukum.</p>
<p>3. <i>Pengembangan jumlah dan mutu sumber daya dosen dan tenaga pendukung</i></p>	<p>(1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas dosen dengan mengutamakan dosen yang bergelar doktor dalam bidang yang sesuai.</p> <p>(2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas dosen dengan kemampuan analisis dan pemecahan kasus dalam pembelajaran hukum.</p> <p>(3) Meningkatkan kemampuan tenaga pendukung dalam bidang sistem informasi manajemen untuk pengembangan bahan pembelajaran.</p>
<p>4. <i>Pengembangan kualitas dan relevansi kurikulum</i></p>	<p>(1) Mengembangkan struktur dan isi kurikulum secara komprehensif sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan zaman.</p> <p>(2) Meningkatkan relevansi dan integrasi kurikulum sesuai dengan tuntutan profesi.</p> <p>(3) Mengembangkan muatan kurikulum untuk pemutakhiran teori dan konsep-konsep hukum yang terus berkembang sebagai bekal pengembangan keahlian profesional.</p> <p>(4) Mengembangkan akses teknologi untuk peningkatan proses pembelajaran.</p>
<p>5. <i>Pengembangan efektivitas proses pembelajaran</i></p>	<p>(1) Mengembangkan Laboratorium Hukum untuk mendukung kajian konsentrasi memperkuat pengembangan kompetensi mahasiswa.</p> <p>(2) Meningkatkan rekrutmen dosen praktisi dalam rangka meningkatkan asas profesional.</p> <p>(3) Memperbaiki proses dan output mata kuliah konsentrasi dan metode penelitian untuk tesis dalam bentuk <i>Research Output</i> sehingga mempercepat kelulusan mahasiswa.</p> <p>(4) Introduksi mata kuliah yang sifatnya hukum terapan seperti program training dan pelatihan-pelatihan.</p>
<p>6. <i>Pengembangan suasana akademik yang semakin kondusif</i></p>	<p>(1) Secara terus menerus mengadakan langkah-langkah proaktif dalam meningkatkan suasana akademik yang mendukung proses pembelajaran.</p> <p>(2) Meningkatkan/menambah sarana dan</p>

	<p>prasarana.</p> <p>(3) Mengoptimalkan berbagai kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler untuk menggali potensi dan prestasi mahasiswa.</p> <p>(4) Meningkatkan aktivitas interaksi dosen dengan mahasiswa dan segenap sivitas akademika.</p>
<p><i>7. Pengembangan sistem penjaminan mutu</i></p>	<p>(1) Merancang sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik.</p> <p>(2) Mengimplementasi tujuh standar SPMI-PT (Sistem Penjaminan Mutu Internal – Perguruan Tinggi)</p> <p>(3) Melaksanakan audit mutu internal secara periodik diadakan setiap tahun.</p>

ANALISIS SWOT

E K S T E R N A L	OPPOURTUNITIES (O)	THREATS (T)
	<p>Visi dan misi yang sangat jelas, realistik serta memiliki saling keterkaitan yang mencerminkan eksistensinya sebagai prodi yang terkemuka sekaligus menjadi unggulan. Sejumlah makna yang terkandung didalamnya yang sangat mendasar berupa nilai-nilai dan prinsip-prinsip bukan saja sangat berguna dan relevan dalam dunia akademik, melainkan juga sangat relevan dengan jiwa dan semangat kehidupan kabaharian, keberanian, kearifan, dan humanis. Sehingga melalui visi dan misi itu tergambaran kualifikasi lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif dalam pengembangan ilmu dan penciptaan konsep baru, profesional, dan bermoralitas tinggi. Selain itu, mekanisme perumusan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, sangat memudahkan persamaan persepsi dalam pencapaian tujuan dan sasaran program studi.</p>	<p>Visi dan misi tersebut memiliki muatan dan cakupan yang luas sehingga aspek kontuitas dan penguatan kelembagaan menjadi sangat penting di dalamnya.</p> <p>Visi dan misi masih diperlukan strategi sosialisasi ke semua elemen masyarakat yang memiliki potensi hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Peran penting yang melekat dalam tugas yang diemban prodi di tengah krisis yang masih melanda negeri ini, juga telah di tengah kompetisi di segala bidang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencapaian visi dan misi prodi.</p> <p>Nilai dan semangat kemaritiman belum sepenuhnya membumi di kalangan masyarakat umumnya, sehingga memerlukan strategi tersendiri dalam rangka menjadikannya sumber inspirasi dan semangat bagi akademisi dan masyarakat umumnya.</p>
I N T E R N A L	STRENGTHS (S)	STRATEGI S-O
	<p>1. Visi, Misi, Tujuan, Program Studi, sangat visioner dan berorientasi kepada pencapaian harapan, saasaran dan</p>	<p>1. Prodi S2 ilmu hukum sebagai prodi yang unggul dan telah mendapatkan kepercayaan masyarakat di Wilayah Timur Indonesia,</p>
	STRATEGI S-T	
		<p>1. Dengan komitmen yang sama dan searah bagi civitas akedemika dan staf kependidikan akan</p>

<p>target sesuai program yang terkait dengan pengembangan ilmu hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Visi dan Misi yang dimiliki Program Studi Magister Ilmu hukum sangat realistis yang mencerminkan keadaan dan kemampuan objektif dalam menghadapi tantangan sekaligus menjadi solusi terhadap persoalan dan tantangan yang hadapi prodi ini. 3. Sebagai salah satu Universitas Terbesar di Indonesia Bagian Timur, Telah menjadi tumpuan dan harapan masyarakat terutama dalam membangun kehidupan yang tertib serta secara akademik memberikan perlindungan bagi masyarakat 4. Visi yang dimiliki Program Studi Magister Ilmu Hukum, sarat akan nilai yang direpresentasikan melalui keterpaduan penguasaan, pengembangan dan penciptaan konsep baru dalam Ilmu Hukum. 	<p>terus menerus melakukan pengembangan baik dalam pengelolaan program yang efektif dan berkualitas, juga secara terus menerus melakukan sosialisasi kepada stakeholder.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dan lembaga negara yang terkait dengan pengembangan dan penegakan hukum. 3. Mendorong dosen untuk berkarya dan berinovasi dibidang ilmu hukum terutama dalam penelitian dan publikasi karya ilmiah secara nasional dan internasional. 4. Melakukan evaluasi dan peninjauan kebijakan terutama terhadap kurikulum dan updating materi pengajaran. 5. Menggunakan kekuatan alumni sebagai sarana fasilitator terjalannya kerjasama dengan instansi lain dalam peningkatan Program Studi. 	<p>menjaga tata kelola prodi yang efektif dan berkualitas, dilandasi dengan semangat kemaritiman yang melahirkan kinerja pengelolaan prodi yang baik, kondusif, dan efektif.</p>
<p>WEAKNESSES (W)</p>	<p>STRATEGI W-O</p>	<p>STRATEGI W-T</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan misi yang sangat jelas itu secara terus menerus idealnya disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat terutama yang terkait dengan ilmu hukum, namun hal ini masih terkendala dalam pelaksanaannya karena keterbatasan waktu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode dan pola sosialisasi visi dan misi dilakukan secara cerdas dan multimedia baik secara internal lingkungan kampus, maupun secara eksternal bagi seluruh stakeholder yang terkait dengan bidang ilmu hukum. 2. Meningkatkan kegiatan ilmiah yang bersifat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Visi, misi dan tujuan akan dijabarkan lebih detail lagi, agar proses sosialisasi dapat efektif, dan menghindarkan salah penafsiran terhadap nilai –nilai

<p>2. Penguatan nilai-nilai yang terkandung dalam visi masih memerlukan upaya implementasi baik secara internal maupun eksternal, sehingga nilai-nilai tersebar dan dipahami secara umum dalam kehidupan.</p> <p>3. Semangat dan komitmen berbasis nilai-nilai yang visioner akan bermakna manakala terimplementasi dalam setiap langkah dan kebijakan dalam pengelolaan prodi.</p> <p>4. Dengan dukungan sumber daya manusia yang sangat memadai sebagian besar professor, menjadi tantangan tersendiri mengingat kesibukan dan permintaan masyarakat tenaga profesional tersebut terus meningkat, yang berdampak langsung pada proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas.</p>	<p>pengembangan kompetensi keilmuan prodi yang secara langsung memberikan manfaat kepada pengguna dalam rangka peningkatan proses pembangunan bangsa.</p> <p>3. Meningkatkan jaringan kerjasama kepada pemerintah, perguruan tinggi, LSM, Kantor Advokat, dan masyarakat umumnya sehingga penyebar luasan visi dan misi sekaligus berlangsung di dalamnya.</p> <p>4. Meningkatkan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat terutama dalam peningkatan profesionalisme hukum dan penegakannya.</p>	<p>yang terkandung dalam visi, misi dan tujuan tersebut.</p> <p>2. Tuntutan perubahan dan kebutuhan masyarakat yang sangat cepat, sekaligus menuntut adanya penyesuaian dengan kompetensi lulusan yang relevan.</p> <p>3. Kesiapan berkompetisi dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka agar tetap menjadi prodi yang diharapkan dapat memberikan nilai lebih bagi masyarakat dalam mengatasi dan meningkatkan kualitas kehidupannya.</p>
--	---	--

KOMPONEN B

TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU

1. Sistem Tata Pamong

Sistem Tata Pamong yang dimiliki Program Studi S2 Ilmu Hukum merupakan bagian integral dari Universitas Hasanuddin yang memayunginya. Tata kelola prodi dilakukan berdasarkan prinsip yang menjamin terselenggaranya Program studi yang kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil. Sistem tata kelola yang dibangun tersebut semuanya terumuskan dengan sangat jelas dan terukur dalam Bagan Tupoksi berdasarkan statuta Universitas Hasanuddin yang ditetapkan dengan Keputusan Mendiknas Nomor 192/O/2003.

Tata hubungan dan koordinasi penyelenggaraan Prodi Ilmu hukum telah mengalami perubahan yang signifikan, sebelumnya posisi prodi ilmu hukum berada di bawah kewenangan pengelola Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Pola pengelolaan program studi yang monodisipliner dikembalikan pengelolaan sistem administrasi akademiknya ke fakultas masing-masing. Namun demikian hubungan koordinasi dengan PPS masih terus berjalan terutama untuk pelaksanaan sistem pengendalian dan penjaminan mutu.

Tata pamong yang dapat menjamin terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaiannya akan berjalan secara efektif melalui mekanisme yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor tersebut, sehingga dapat menjamin proses dan mekanisme kerja pada semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi.

Secara realistis, tata pamong yang terbangun telah didukung dengan budaya organisasi (*good Governance Universty*) yang mencerminkan ditegakkannya semua aturan, hubungan tat kerja, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem

penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (*input*, proses, *output* dan *outcome* serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

Dalam pengelolaan Program Studi Magister Ilmu Hukum telah dilandasi dengan sistem tata pamong yang dapat menjamin terwujudnya visi dan terlaksananya misi serta tercapainya tujuan program studi. Sistem tata pamong yang kredibel tergambar dengan adanya komitmen tinggi serta dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para pengelola program studi terhadap tugas-tugas dan tanggung jawabnya, yang diperolehnya baik melalui pembinaan berkelanjutan maupun melalui pendidikan dan pelatihan yang terprogram dengan baik.

Program Studi ini berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang terkoordinasi secara vertikal dan memiliki hubungan secara fungsional dengan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan induk keilmuan yakni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Mengenai tugas pokok dan fungsi Program Studi diatur dengan jelas dalam uraian tugas dan hubungan kerja Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi, program studi dipimpin oleh seorang ketua dan di bantu oleh seorang sekretaris yang bertugas membuat perencanaan studi dan pengorganisasian kegiatan program studi.

Dasar Tata Pamong yang mengatur penyelenggaraan prodi magister ilmu hukum telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Unhas mengenai ketentuan pengelolaan program magister monodisipliner dan multidisipliner.

Pengembangan dan penilaian pranata kelembagaan dilaksanakan dengan didasarkan pada Kebijakan Akademik, Renstra, Buku Panduan Akademik, buku Panduan Penulisan Tesis, dan *Standard Operating Procedure*.

2. Kepemimpinan

Metode kepemimpinan Program Studi Magister Ilmu Hukum, dilakukan dengan mengedepankan beberapa prinsip kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Untuk kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan program studi menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini sangat berkaitan dengan komitmen dan kompetensi para pimpinan program studi dan penempatan staf kependidikan yang tepat dan berkapasitas.

Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan tata kerja dan hubungan antar unit dalam organisasi perguruan tinggi termasuk di dalamnya hubungan dan tata kerja program studi.

Sementara itu kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan dalam membangun serta menjalin jaringan kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. Kemampuan membangun jaringan yang diwujudkan nantinya dalam perjanjian kerjasama kemitraan terhadap institusi yang relevan dengan pengembangan kapasitas prodi baik terhadap institusi negara maupun swasta dan organisasi profesi lainnya.

a. Kepemimpinan Operasional

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh tenaga kependidikan yang terintegrasi dengan tenaga kependidikan Universitas Hasanuddin. Pimpinan Program Studi Magister Ilmu Hukum senantiasa menyusun perencanaan yang baik guna menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. Perumusan visi, misi yang realistis, kredibel serta mampu mengkomunikasikan visi dan misi ke depan dengan didasarkan pada nilai-nilai kemaritiman, yaitu Integritas, Inovatif, Katalitik dan Arif.

Dalam setiap kegiatan ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, FGD) yang dilakukan dalam lingkup Program Studi Magister Ilmu Hukum, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum senantiasa memberikan arahan dan menyampaikan pentingnya implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam visi dan misi Program Studi Magister Ilmu Hukum, sehingga penanaman nilai-nilai

yang terkandung di dalamnya diketahui oleh seluruh civitas akademika dengan sangat baik.

b. Kepemimpinan Organisasi

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara organisasi terintegrasi dengan Universitas, Sekolah Pascasarjana dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pengorganisasian dilakukan dengan mengedepankan hubungan keharmonisan, sehingga mampu menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi. Setiap keputusan diambil secara bijaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Statuta dan Pedoman Sekolah Pascasarjana, serta Pedoman Program Studi Magister Ilmu Hukum. Begitu pula, dengan masukan dari Pimpinan Sekolah Pascasarjana, Pimpinan Fakultas Hukum, serta pihak lain yang berkepentingan.

c. Kepemimpinan Publik

Pimpinan Universitas Hasanuddin, pimpinan Sekolah Pascasarjana, pimpinan Fakultas Hukum dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum memiliki komitmen yang kuat dan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sebagai salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam masyarakat. Penelitian yang dilakukan baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa senantiasa diarahkan pada pemecahan masalah isu sentral yang ada di masyarakat. Manfaat yang dihasilkan dalam pengelolaan program studi magister ilmu hukum harus mampu dirasakan tidak hanya oleh mahasiswa yang menyelesaikan program studi, tetapi juga oleh masyarakat luas.

3. Sistem Pengelolaan

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Program Studi Magister Ilmu Hukum mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengembangan staf (*staffing*), kepemimpinan (*leading*), *controlling* dalam kegiatan internal maupun eksternal. Pengelolaan Prodi Magister Ilmu Hukum dilakukan melalui suatu proses Perencanaan yang sangat baik dengan Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja, secara teknis disebut Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). Tahapan pengelolaan meliputi; Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksana, Sasaran, dan Pengawasan. Semua tahap ini terangkum dalam sistem perencanaan yang telah dibakukan oleh universitas berdasarkan panduan dari Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengelolaan Universitas Hasanuddin didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan adanya sistem *checks and balances*. Pengelolaan juga didasarkan pada prinsip bahwa seluruh tugas akademik dan non-akademik harus terbagi habis dalam seluruh struktur/komponen.

Rincian tugas pokok dan fungsi serta tata hubungan antar organ telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Tentang Struktur Organisasi Universitas Hasanuddin. Di samping itu sebagai bentuk dari Implementasi dari *good university governance*, pengelolaan dilaksanakan secara tertib sasaran, tertib anggaran, tertib administrasi, tertib pengawasan, dan tertib laporan. Untuk menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan tersebut, diterbitkan berbagai peraturan Rektor baik dalam bentuk tata tertib, tata cara, pedoman, maupun kebijakan yang digunakan sebagai dasar dan untuk mendukung sistem pengelolaan universitas. Semua unit kerja wajib menjalankan dan mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan pada tingkat universitas. Penerapan sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang mencakup *planning, organizing, staffing, leading, controlling*, dideskripsikan penerapannya dengan jelas yang terangkum dalam *Standar Operating Prosedure (SOP)* pengelolaan, sebagai berikut.

a. Planning (perencanaan)

1) Bidang Pembelajaran

Sistem perencanaan di bidang akademik dilakukan berdasarkan Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin dengan pola Sistem Kredit Semester (SKS) yang diterapkan ke dalam semester awal dan semester akhir. Perencanaan kegiatan akademik tersusun secara sistematis melalui Kalender Akademik yang disusun setiap tahun ajaran dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Dalam sistem pembelajaran direncanakan secara terprogram melalui Rapat dengan agenda utama penentuan mata kuliah, penentuan tim pengajar, jadwal kuliah, jadwal ujian, penyusunan ruang kuliah, ujian akhir semester, serta penentuan batas akhir pemasukan nilai ujian.

Perencanaan pembelajaran dalam setiap semester untuk setiap mata kuliah, setiap penanggung jawab mata kuliah wajib membuat dokumen pembelajaran mulai dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Jadwal Kegiatan Mengajar (JKM), dan Satuan Acara Pengajaran (SAP). Agar perencanaan pembelajaran semakin efektif dan terukur, maka setiap pengajar diharuskan untuk membuat kontrak perkuliahan, modul, dan bahan ajar.

2) Bidang Penelitian

Penyusunan perencanaan di bidang penelitian, didasarkan pada *roadmap* penelitian yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai payung bagi semua kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sehingga pelaksanaan penelitian tidak di dasarkan pada masing-masing program studi, melainkan terintegrasi dengan *roadmap* yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Setiap dosen diberi kesempatan untuk mengajukan proposal penelitian secara kompetitif dan terseleksi oleh *reviewer* internal maupun eksternal. Selain itu, dosen pada program studi, termasuk pada Program Studi Magister Ilmu Hukum senantiasa didorong untuk dapat

berkompetisi pada penelitian-penelitian yang dibiayai oleh Dikti atau sumber pembiayaan lainnya.

3) Bidang Pengabdian pada Masyarakat

Program Studi Magister Ilmu Hukum berkewajiban memberikan pemahaman kepada masyarakat berkenaan dengan Ilmu Hukum. Untuk itu Pimpinan Program Studi Magister Ilmu Hukum mengajukan rancangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan rencana kegiatan pengabdian Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan mewajibkan seluruh dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

4) Bidang Manajemen Internal

Pengelolaan prodi secara internal terencana dengan baik. Di bidang anggaran pengelolaan dilakukan bersamaan dengan program studi lainnya yang tergabung dalam RKAT Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selain untuk menyusun RKAT pada setiap awal tahun anggaran, dilakukan juga penilaian terhadap kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada tahun sebelumnya. Kemampuan dalam penyusunan rencana kerja ke depan, dilakukan secara objektif, rasional dan terukur serta didukung dengan ketersediaan anggaran.

Pimpinan Program Studi Magister Ilmu Hukum merencanakan program kerja yang berbasis pada kemampuan dan kapasitas yang dimiliki. Setiap akhir tahun kegiatan dilakukan evaluasi.

b. Organizing (Pengelolaan)

1) Bidang pembelajaran

Terkait dengan bidang pembelajaran, pertama-tama dilakukan dengan mengorganisasi segala sesuatu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan proses pembelajaran, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, alat pendukung pembelajaran (Listrik, Komputer, LCD, AC, Jaringan Internet). Penyiapan dokumen pembelajaran yang melibatkan para pengajar, tahapan-tahapan dalam pembelajaran (kuliah, evaluasi

dan monitoring perkuliahan). Program Studi mengkoordinir pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan jadwal dan dosen pengajar yang telah ditetapkan. Pengorganisasian penentuan judul usulan penelitian, seminar proposal, seminar hasil penelitian dan pelaksanaan ujian Tesis, dilakukan dengan sangat cermat oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum.

2) Bidang kegiatan penelitian

Prodi Magister Ilmu Hukum mendorong kepada dosen untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya baik yang dibiayai oleh dana Universitas Hasanuddin, Dikti, maupun sumber pembiayaan lainnya. Dalam pelaksanaan kegiatan, Program Studi mengkoordinasikan dengan pihak Fakultas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

3) Bidang kegiatan pengabdian pada masyarakat

Prodi Magister Ilmu Hukum melakukan pengorganisasian yang baik terkait dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum, bantuan hukum, atau konsultasi hukum. Pengorganisasian dilakukan terhadap dosen, substansi/materi, ataupun kelompok sasaran yang akan dituju (profesi, swasta, dan masyarakat)

4) Bidang manajemen internal

Program studi sangat memerlukan pengorganisian yang baik agar semua potensi, elemen, kekuatan, aset dapat diorganisir dengan baik dan bertanggung jawab. Pimpinan Program Studi sangat mendukung agar semua potensi dapat berfungsi dengan baik dan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur.

c. Staffing (Pemberdayaan Staff)

1) Bidang pembelajaran

Prodi Magister Ilmu Hukum dalam proses pembelajaran selain penentuan tugas staf akademik yang berfungsi mengatur dan menyiapkan sarana dan peralatan pendukung kegiatan, juga penentuan dan pengaturan tenaga pengajar secara *team teaching* sesuai kompetensi, kepangkatan, dan pendistribusian mata kuliah yang berimbang ke semua tenaga pengajar, merata dan profesional.

2) Bidang kegiatan penelitian

Program Studi Magister Ilmu Hukum menunjuk dan menetapkan tim peneliti yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Penentuan kualifikasi dosen peneliti untuk jabatan ketua, pendamping, anggota tim peneliti dilakukan sesuai dengan kompetensi bidang keilmuannya.

3) Bidang kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Program Studi Magister Ilmu Hukum melakukan penunjukan dan penetapan tim penyuluh, tim konsultasi hukum, atau tim bantuan hukum yang disesuaikan dengan kompetensi keilmuannya, agar sesuai kebutuhan dengan kelompok sasaran.

4) Bidang manajemen internal

Program Studi Magister Ilmu Hukum membangun sinergi yang kuat dengan bekerjasama antara Pengelola Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai suatu organisasi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Program Studi.

d. Leading

1) Bidang pembelajaran

Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum bersama sama para penanggung jawab matakuliah menjalankan tugas dengan baik, terjadwal, dan bertanggung jawab. Semua bentuk tugas yang berkaitan dengan

pembelajaran dilakukan secara profesional dan terkoordinasi dengan baik.

2) Bidang penelitian

Ketua Prodi memberikan penjelasan dan arahan kepada para calon peneliti agar melakukan kegiatannya secara profesional, terdokumentasi dengan baik, dan senantiasa berorientasi pada keberhasilan dan tercapainya sasaran penelitian secara objektif.

3) Bidang pengabdian pada masyarakat

Ketua Prodi mengarahkan kepada Tim Penyuluh, Tim Konsultasi, atau Tim Bantuan Hukum untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan penuh tanggungjawab, menjunjung tinggi nilai etika dan moral, agar sasaran kegiatan pengabdian dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

4) Bidang manajemen internal

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum secara terprogram dan berkesinambungan selalu dilakukan pembinaan kepada dosen dan tenaga kependidikan agar memahami dan menjiwai tugas-tugas yang diembannya, dan merasakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan program studi, demikian pula dalam pencapaian sasaran yang diharapkan.

e. Controlling

1) Bidang pembelajaran

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum melakukan kontrol dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang terukur dan transparan, terutama kontrol terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa, konsistensi dosen dalam memberikan materi perkuliahan, ketersediaan RPS dan RPP, pemberian tugas yang relevan, indikator penilaian dan kelulusan.

2) Bidang penelitian

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum melakukan kontrol terhadap standar-standar evaluasi dan keberhasilannya, mulai dari relevansi

judul, pelaksanaan seminar proposal, pembuatan laporan penelitian dan penyerahan laporan hasil penelitian agar tepat waktu, dan publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah.

3) Bidang pengabdian kepada masyarakat

Kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat selalu dilakukan secara terbuka dan terukur oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum agar sasaran kegiatan yang akan dicapai terwujud. Kesesuaian keahlian dosen dengan materi sosialisasi yang disampaikan, penentuan metode sosialisasi yang tepat, dan sistem pelaporan kegiatan yang baik dan objektif, serta pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat menjadi perhatian khusus oleh Ketua Program Studi.

4) Bidang manajemen internal

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum melakukan kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan secara teratur dan terukur. Begitu pula evaluasi kinerja terhadap tenaga kependidikan dan dosen dalam menjalankan tugas-tugasnya yang terdokumentasi dengan baik.

Setiap pengelolaan kegiatan yang telah dicanangkan dalam program studi dalam mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi tertuang dengan baik dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi yang terekam dalam dokumen yang lengkap.

4. Penjaminan Mutu

Pelaksanaan penjaminan mutu pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dilakukan dengan meningkatkan pelayanan akademik, baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari segi mutu *input* dan *output*-nya. Peningkatan mutu dan pelayanan akademik yang dimaksud telah diupayakan melalui sistem penjaminan mutu oleh Gugus Penjaminan Mutu yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penjaminan mutu merupakan serangkaian upaya mewujudkan budaya kualitas secara bertahap, sistematis, dan terencana melalui standar mutu layanan dan *outcome* yang telah ditetapkan agar dapat memberikan kepuasan pada *stakeholders*. Tujuan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu akademik pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara berkelanjutan yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.

Penyelenggaraan program studi Magister Ilmu Hukum mengacu pada kebijakan akademik di tingkat Universitas yakni pada setiap Program Studi harus dilakukan audit secara internal oleh **AMI** (Audit Mutu Internal) yang dilaksanakan setiap tahun oleh Lembaga Pengkajian Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Hasanuddin. Hasil audit akademik internal yang dilaksanakan oleh LPMPP, Program Studi menindaklanjuti temuan-temuan tersebut sebagai umpan balik kepada LPMPP dan melakukan perbaikan sesuai saran-saran serta melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan dengan baik.

Pada Tingkat Fakultas Hukum, pelaksana penjaminan mutu dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang mempunyai kewenangan untuk menyusun berbagai dokumen penjaminan mutu, diantaranya Standar Operasional Prosedur pada setiap jenjang pendidikan (Sarjana, Magister, dan Doktor), dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu. Pendirian lembaga Penjaminan Mutu ditingkat Fakultas didasarkan atas Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin No. 7070/H4.7/KP.23/2010, dan keanggotaan tim penjaminan mutu, terakhir berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum No. 2341/UN4.6/KP.24/2015 tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Program Studi Magister Ilmu Hukum memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan akademiknya selama tidak bertentangan dengan kebijakan pendidikan nasional. Sejalan dengan hal tersebut maka Program Studi Magister Ilmu Hukum bersama dengan Prodi Lainnya yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, menyusun Manual Mutu Akademik (MMA), yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Manual Mutu Akademik ini berlaku bagi kegiatan akademik pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selain Manual Mutu Akademik dimaksud, untuk pelaksanaan penjaminan mutu, terdapat dokumen akademik penjaminan mutu, yaitu Standar Akademik, Manual Prosedur (MP), Spesifikasi Program Studi, dan Peraturan Akademik pada setiap jenjang program pendidikan hukum. Manual yang mencakup Sistem Penjaminan Mutu Akademik dan Sistem Audit Mutu Akademik ini akan menjadi acuan bagi pengelolaan jenjang program studi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam upaya peningkatan proses pembelajaran.

Sistem penjaminan mutu akademik pada tingkat universitas diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Hasanuddin. Lembaga ini berwenang untuk melakukan pelatihan-pelatihan peningkatan proses pembelajaran dan penjaminan mutu.

ANALISIS SWOT

E K S T E R N A L	OPPOURTUNITIES (O)	THREATS (T)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada sistem tata pamong yang menganut prinsip <i>good university governance</i> yang mengedepankan dengan prinsip akuntabilitas transparansi dan adanya sistem <i>check and balances</i> telah tersusun secara sistematis dan tersosialisasi dengan sangat baik. 2. Memberikan kesempatan yang terbuka bagi staf pada semua jenjang tugas untuk berkreasi dan bertindak kreatif dalam menyusun serta merencanakan program-program yang sesuai dengan visi dan misi serta tujuan program studi. 3. Dengan ditetapkannya sistem tata kelola organisasi yang terbuka tersebut juga berkaitan langsung dengan pembinaan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka diperlukan perencanaan sistem pendidikan dan pembinaan staf yang terprogram. 4. Peningkatan keterampilan dan kualitas aparatur Negara telah mendapatkan perhatian pemerintah terutama dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menuju sistem pemerintahan yang <i>clear governance</i>. 	<p>Dengan sistem tata pamong yang kredibel dan akuntabel menjadi dambaan dan kebutuhan masyarakat yang sangat selektif dalam memilih tempat pendidikan yang professional tanpa mengeluarkan biaya yang terlalu mahal, dan sebaliknya mendapatkan hasil yang berkualitas. Pengelolaan institusi pendidikan yang baik dengan sistem manajemen yang baik pula, belumlah menjadi ukuran keberhasilan segala-segalanya, namun masih diperlukan kesiapan dan kemampuan dalam menghadapi persaingan terutama di era global ini. Dalam kondisi seperti sudah menjadi keharusan untuk menghadirkan sistem pengelolaan yang komprehensif dan terpadu baik secara internal maupun terhadap jaringan dengan pihak luar.</p>
INTERNAL	STRENGTHS (S)	STATEGI S-O
<p>Dengan prinsip pengelolaan program studi yang berbasis pada tata kelola universitas yang baik (<i>good university</i></p>	<p>Pimpinan program studi akan senantiasa mengembangkan etos kerja kepada semua elemen yang menjalankan fungsi-fungsi pada setiap program studi. dan untuk</p>	<p>Pimpinan akan menjaga dan meningkatkan etos kerja kepegawaian, dan akan merencanakan kegiatan <i>Bencmarking</i></p>

<p><i>governence</i>) dengan prinsip akuntabilitas transparansi dan adanya sistem <i>check and balances</i>. Pada tingkat pengelolaan program studi atau fakultas selain telah terstruktur dengan baik juga masih terdapat unit-unit penyelenggara kegiatan yang sangat menopang tercapainya sasaran program studi. peran unit pengawas internal Universitas Hasanuddin dan Komisi Disiplin Fakultas Hukum Unhas sangat berperan dalam menciptakan proses pembelajaran yang kondusif dan akuntabel.</p>	<p>melakukan control akan hal itu, pimpinan program studi akan senantiasa melakukan koordinasi dengan unit penjaminan mutu dan komisi disiplin yang ada pada fakultas hukum unhas selaku institusi yang mengelola program studi Magister Ilmu Hukum.</p>	<p>untuk waktu ke depan, sehingga pelayanan kepada mahasiswa dapat dilaksanakan dengan senantiasa mengikuti perkembangan pengelolaan universitas yang baik dengan temuan-temuan metode yang baru yang lebih efektif.</p>
<p>WEAKNESSES (W)</p>	<p>SRATEGI W-O</p>	<p>STRATEGI W-T</p>
<p>Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah diprogramkan dengan baik belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain karena belum tersedianya anggaran yang memadai dan tepat waktu baik yang bersumber dari universitas maupun fakultas sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana dan jadwal yang telah ditentukan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perencanaan yang matang untuk menghindari kekurangan anggaran dalam hal pengembangan SDM yang dimiliki Program Studi. 2. Menghimbau dan melakukan pembinaan terhadap pegawai melalui pelatihan-pelatihan <i>Soft Skill</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan terkait tata pamong pengelolaan program studi. 2. Melakukan evaluasi terhadap peraturan terkait tata pamong, dan melakukan perubahan jika diperlukan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Pengelolaan institusi pendidikan yang baik dengan sistem manajemen yang baik pula. 3. Memperluas <i>network</i>, dalam melakukan pengembangan SDM.

KOMPONEN C

MAHASISWA DAN LULUSAN

1. Mahasiswa

Sistem rekrutmen mahasiswa baru pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin. Terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 2784/ UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin.

Lebih lanjut diatur dalam Keputusan Rektor Nomor 2083/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister dan Program Doktor Universitas Hasanuddin, Tahap II Semester Awal T.A. 2018/2019.

Rekrutmen mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi ujian tertulis yang meliputi bidang keilmuan pengetahuan hukum, Tes Potensi Akademik (TPA) dan Test Bahasa Inggris (TOEFL) dengan mengacu kepada Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 18371/HP/PP.25/2011 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Hasanuddin, diganti terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 36621/UN4.1/PP/37/2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Hasanuddin.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tersebut bahwa Persyaratan mahasiswa baru mencakup persyaratan akademik dan persyaratan administrasi, yakni:

1) Persyaratan Akademik:

- a. Berijazah sarjana (S1) jalur skripsi dengan IPK minimal **2.75** dari program studi terakreditasi.
- b. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan skor minimal 450 setara TOEFL dan nilai skor TPA minimal 450.
- c. Lulus ujian seleksi masuk Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

- d. Tidak dinyatakan putus studi pada salah satu Program Studi PPs Unhas atau PPs perguruan tinggi lain.
- e. Lulusan program sarjana Unhas dengan predikat *cum laude* dapat melanjutkan pendidikan di PPs Unhas dalam ilmu serumpun tanpa ujian masuk sebelum umur ijazah melebihi 2 (dua) tahun.

2) Persyaratan Administrasi:

Menyerahkan formulir pendaftaran yang lengkap dengan lampiran sebagai berikut:

- 1) Fotokopi ijazah yang telah disahkan atau tersertifikasi bagi ijazah lulusan luar negeri (2 rangkap).
- 2) Fotokopi transkrip yang telah disahkan (2 rangkap).
- 3) Surat keterangan berbadan sehat.
- 4) Biodata (formulir disiapkan).
- 5) Surat rekomendasi dari dusata orang dosen yang mengenal kapasitas akademik yang bersangkutan dalam disiplin ilmu yang selingkup.
- 6) Surat izin dari atasan yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, ABRI Polisi, atau karyawan.
- 7) Bukti pembayaran biaya pendaftaran.
- 8) Foto berwarna, setahun terakhir ukuran 3 X 4 cm (3 lembar).
- 9) Formulir BPPS bagi yang bermohon dan memenuhi syarat.
- 10) Fotokopi surat keterangan akreditasi program studi S1 yang telah dilegalisir.

Dalam peraturan Rektor tersebut juga diatur bahwa Selain melakukan penerimaan mahasiswa baru melalui proses pendaftaran pada awal tahun ajaran baru, Program Studi Magister juga melakukan penerimaan mahasiswa asing dan mahasiswa pindahan, dengan persyaratannya sebagai berikut:

a. Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Asing

- 1) Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa PPs Unhas jika memenuhi persyaratan akademik dan administrasi seperti disebutkan pada point 2.a dan 2.b, serta memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang cukup yang ditunjukkan dengan sertifikat Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) dari Fakultas Ilmu Budaya Unhas.

- 2) Memperoleh izin belajar dari Kementerian Pendidikan Nasional RI.
 - 3) Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa program magister pada perguruan tinggi luar negeri yang tela Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2) terakreditasi oleh Dikti dapat diterima sebagai mahasiswa riset (*credit earning*) selama periode tertentu.
- b. Persyaratan Penerimaan mahasiswa pindahan:
- 1) Surat lamaran diajukan ke Rektor Unhas secara resmi dan tertulis.
 - 2) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi terakreditasi yang sama di perguruan tinggi asal pada saat mengajukan permohonan pindah ke PPs Unhas.
 - 4) Memiliki surat persetujuan pindah dari perguruan tinggi asal.
 - 5) Lulus evaluasi dua semester dan tidak putus studi.
 - 6) Memiliki IPK > 3,00.
 - 7) Memperoleh persetujuan KPS dan direktur untuk program studi multidisiplin. KPS dan dekan untuk program studi monodisiplin dan oligodisiplin yang terkait dengan pertimbangan daya tampung dan sisa masa studi.
 - 8) Mahasiswa pindahan dari luar negeri harus berasal dari PPs terakreditasi oleh Dikti.
 - 9) Mahasiswa pindahan yang diterima di PPs Unhas ditetapkan dengan keputusan rektor.

Penentuan Kelulusan dilakukan dengan hasil ujian tertulis bidang keilmuan, TPA, TOEFL dan hasil ujian wawancara serta pertimbangan nilai akademik. Nilai hasil ujian tertulis, dan wawancara diajukan pada rapat penentuan penerimaan mahasiswa baru yang dipimpin oleh Rektor dan dihadiri oleh Dekan Sekolah Pascasarjana, Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi. Mahasiswa yang dinyatakan diterima ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, kemudian hasil seleksi disampaikan kepada calon mahasiswa melalui surat Dekan Sekolah Pascasarjana, pengumuman di papan pengumuman, *website* Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan Program Studi Magister Ilmu Hukum. Seluruh kebijakan penerimaan

mahasiswa baru Program Studi Magister dalam lingkungan Universitas Hasanuddin dilaksanakan secara ketat dan konsisten.

2. Prestasi Mahasiswa

Dalam rangka mengembangkan potensi kemahasiswaan baik di bidang Ilmu Hukum, maupun Bidang Keilmuan lainnya yang berkaitan erat dengan pengembangan kecendekiawanan mahasiswa, pimpinan dan Staff pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, senantiasa memfasilitasi mahasiswa agar tetap berprestasi dan mengharumkan nama baik almamaternya.

Dukungan yang diberikan kepada mahasiswa, berupa dukungan moril yakni proses pembimbingan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan, yang mengikuti berbagai kompetisi baik lokal maupun nasional. Selain itu, Program Studi juga melakukan pengembangan *Networking* kepada para alumni, yang berpotensi memberikan dukungan kepada mahasiswa yang akan dan sementara mengikuti kompetisi keilmuan ataupun pelatihan. Berikut ini adalah prestasi yang telah diraih mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum:

Tabel 1: pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik

No.	Nama Mahasiswa	Jenis Prestasi	Kegiatan, Waktu, dan Tempat	Tingkat (Lokal, Wilayah, Nasional, atau Internasional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dirah Nurmila Siliwadi, et al	Penelitian	“Implementation of The National Health Insurance Scheme in The Public Health in Palopo City in Indonesia”, Journal of Health, Medicine and Nursing, An International Peer-Reveiwed Journal, ISSN 2422-8419, Vol. 34, 2017	Internasional
2	Handar Subhandi Bakhtiar, et al	Penelitian	“Violation of The Sovereignty of Indonesia Airspace by Foreign Aircraft”, International Journal of Advanced Research (IJAR), ISSN 2320-5407, February 2017	Internasional
3	Wahdaningsi, et al	Penelitian	“Custody Services of The Human Rights Perspective”, Quest Journal, Journal of Research in Humanity and Social Science, ISSN (Online) 2321-9467, Vol. 5, Issue 4 (2017), page 48-51	Internasional
4	Nur Akifah Januar, el al	Penelitian	“The Implementation of Palermo Protocol of 2000 in Combating the Human Trafficking in Indonesia”, International Journal of Humanities and Social Science Invention, ISSN (Online) 2319-7722, ISSN (Print) 2319-7714, Vol. 6, Issue 5 (May 2017), page 58-60	International
5	Lestari Sainuddin, et al	Penelitian	“Legal Analysis of Crime Terrorism and Counter Terrorism Strategy”, International Journal of Advanced Research (IJAR), ISSN 2320-5407, July 2017.	Internasional
6	Andi Winarni, et al	Penelitian	“Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika”, Madani Legal Review, ISSN 2519-8353,ISSN (Online) 2580-6319 , Vol. 1 No. 2, 2017	Nasional
7	Septhiany Meryam Saleh,	Penelitian	“Implementasi Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak”, Sam Ratulangi Law Journal	Nasional

	et al			
8	Doddy Agustinus Tumanduk, et al	Penelitian	"Pemenuhan Hak Asasi Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Hukum di Tingkat Kepolisian", Sam Ratulangi Law Journal,	Nasional
9	Manto Siregar, et al	Penelitian	"Pengadaan Tanah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dalam Upaya Mewujudkan Proyek 35.000 MW", Riau Law Journal	Nasional
10	Hidayat Pratama Putra, et al	Penelitian	"New Paradigm of Abuse of Power on Discretion After Government Administration Act", Ulrev	Internasional
11	Rina, et al	Penelitian	"Implementations of Law Firms Functions and Duties as Local Government's Legal Counsel in Facing Lawsuits Before the Court (Study in Government of South Sulawesi Province)", International Journal of Advanced Research (IJAR), ISSN 2320-5407	Internasional
12	Hutomo Zulfikar T. Haya, et al	Penelitian	"Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Tahap Penyidikan", Riau Law Journal	Nasional
13	Aznurihsan Krisandi Azis, et al	Penelitian	"Analysis of Regional Regulation of West Sulawesi Province Number 6 of 2016 Concerning Establishment and Composition of Structure in West Sulawesi Province", International Journal of Advanced Research (IJAR), ISSN 2320-5407, May 2018	Internasional
14	Ahmad Fauzi, et al	Penelitian	"Criminal Law Accountability in Giving Certificate of Disease Issued by Doctor to Patient", IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-IHSS), e- ISSN 2279-0837, p-ISSN 2279-0845, Vol. 23, Issue 4, Ver.7 (April 2018), pp 54-59	Internasional
15	Tuti Hardiyanti	Penelitian	"Juridical Review on The Fulfillment of District Head Position", International Journal of Advanced Research (IJAR), ISSN	Internasional

			2320-5407, April 2018	
16	Dian Anggraini Sucianti	Penelitian	"The State Responsibility for The Environmental Damage of Mount Bawakaraeng", International Journal of Advanced Research (IJAR), ISSN 2320-5407, July 2018	Internasional
17	Dina Novitasari Katong	Penelitian	"The Consistency of Legal Analysis for Document Planning and Impementation of Rural Financial Management Based On work Program in Regent of North Bolaang-Mongondow", International Journal of Advanced Research (IJAR), ISSN 2320-5407, July 2018	Internasional
18	Andi Saifullah Sakti	Penelitian	"Criminal Responsibility Analysis in Reporting of Indicated Defamation Delict by Pers", Quest Journal, Journal of Research in Business and Management, ISSN (Online) 2347-3002, Vol. 8-Issue 3 (2018), pp 10-14	Internasional
19	Ismail	Penelitian	"Peranan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia", Musamus Law Review	Nasional
20	Dedi	Penelitian	"The Violation on The Right of Social Health Insurance Participatens in Services of Hospitals, International Journal of Advanced Research (IJAR), ISSN 2320-5407,	Internasional
21	Muspirah	Penelitian	"The Effectiveness of Program Formation of Program Regional Regulation in West Sulawesi Province", International Journal of Science and Research (IJSR), ISSN (Online) 2319-7064, Vol. 7, Issue 7, July 2018	Internasional
22	Yunus	Penelitian	"Legal Objection Effort to The Decision of Commission For The Supervision of Business Competition (KPPU)", Quest Jpurnal, Journal of Research in Business and Management, ISSN (Online) 2347-3002, Vol. 6 – Issue 3 (2018), pp: 72-78	Internasional
23	Nur Rafika Dwi Astuti	Penelitian	"Implementation of Policy Duties and Authorities Towards the Determination of Clear Introduction In Traffic in Makassar City", Quest Journal, Journal of Research in Business and	Internasional

			Management, ISSN (Online) 2347-3002, Vol. 6-Issue 3 (2018), pp. 36-40	
24	Anace Nauw	Penelitian	“Perspektif Hukum Perjanjian Kerja Perseroan Terbatas State Development and Investment Corporation (SDIC) Papua Indonesia Cement Manokwari”, Holrev, ISSN 2548-1762, e-ISSN: 2548-1754, Vol., 2, Issue 2, September 2018, pp 1-18.	Nasional
25	Ayusriadi	Penelitian	“Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum	Nasional

3. Evaluasi Lulusan

Upaya pelacakan dan perekaman terhadap lulusan dilakukan oleh Program Studi melalui Gugus Penjaminan Mutu Fakultas secara intensif dan berkesinambungan dengan dokumen yang lengkap serta terdokumentasi dengan sangat baik. Adapun bentuk pelacakan itu adalah sebagai berikut:

A. Metode Pelacakan dan Perekaman Data Lulusan

Tracer study adalah studi yang dilakukan terhadap lulusan oleh lembaga penyelenggara pendidikan tinggi. Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, mekanisme ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menghasilkan data dan informasi untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu Hukum Unhas, yang hasilnya akan menentukan arah kebijakan program studi dalam menentukan tindak lanjut terhadap upaya perbaikan penyelenggaraan program studi.

B. Proses dan Mekanisme Pelacakan

Tracer Study pada Program Studi Magister Ilmu Hukum dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor: 2667/UN5.6/KP.19/2015 tanggal 3 Maret 2015 tentang Tim Pelaksana *Tracer Study* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun tahapan *Tracer Study* yang diatur dalam Surat Keputusan Dekan itu adalah sebagai berikut:

1. *Tracer Study* dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun, sebelum pelaksanaan lokakarya kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unhas;
2. Fakultas Hukum membentuk Tim yang ditugaskan untuk melakukan *Tracer Study*, menyusun rencana pelaksanaan studi pelacakan lulusan dan umpan balik pengguna;
3. Rumusan sasaran dan materi kegiatan *Tracer Study* meliputi:
 - a. Lulusan, dengan materi pelacakan sebagai berikut:
 - 1) Frekuensi lulusan dalam melakukan lamaran pekerjaan;
 - 2) Waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama;
 - 3) Institusi/tempat bekerja;

- 4) Posisi jabatan yang diperoleh saat pertama bekerja dan perubahannya (jenjang karier);
 - 5) Penggunaan keahlian yang berkaitan dengan bidang keilmuan lulusan pada pekerjaannya;
- b. Pengguna Lulusan, dengan materi pelacakan sebagai berikut:
- 1) Integritas (etika dan moral) lulusan;
 - 2) Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme) lulusan;
 - 3) Bahasa Inggris lulusan;
 - 4) Penggunaan Teknologi Informasi lulusan;
 - 5) Komunikasi lulusan;
 - 6) Kerjasama tim lulusan; dan
 - 7) Pengembangan diri lulusan.
4. Metode pelacakan yang digunakan yaitu wawancara langsung dengan lulusan, *survey* dengan alat bantu berupa kuesioner, dan pelacakan tidak langsung dengan menggunakan media *e-mail*, *short message service* (SMS), telepon, *social network*, dan sebagainya;
5. *Tim Tracer Study*, selanjutnya menyusun laporan hasil pelacakan dan hasilnya diserahkan kepada:
- a. Pimpinan Fakultas untuk dianalisis dan dievaluasi sebagai bahan untuk penyesuaian kompetensi lulusan dan evaluasi kurikulum pada Lokakarya;
 - b. Tim Akreditasi, untuk digunakan sebagai sumber data pengisian dokumen Akreditasi; dan
- Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, untuk digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta penyusunan Rencana Strategis.

4. Himpunan Alumni

Himpunan Lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum terintegrasi dengan Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memiliki perwakilan diberbagai daerah di seluruh Indonesia. Program Studi selalu menjalin komunikasi dengan lulusan baik secara insidentil maupun terprogram, formal maupun non-formal. Komunikasi formal misalnya

dalam pelacakan *study (tracer study)*, sedangkan non-formal misalnya dalam acara ramah tanah setiap wisuda, ramah tamah setiap hari raya keagamaan, dan dies natalis. Dalam membangun komunikasi tersebut, lulusan telah memberikan sumbangan perbaikan sarana/prasarana pembelajaran, misalnya: Renovasi Ruang Kuliah, Sumbangan LCD dan buku-buku literatur, sarana ibadah (Masjid Baitul Hakiem), dan Pembangunan Gedung Perpustakaan Fakultas, Ruang Aula. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Program Studi bersama lulusan membahas perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya pengetahuan praktis yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Hal ini sangat bermanfaat dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan Program Studi ke depannya.

ANALISIS SWOT

		OPPOURTUNITIES (O)	THREATS (T)
E K S T E R N A L		Program Studi Magister Ilmu Hukum merupakan yang tertua di kawasan Indonesia Timur, menjadikan peminat pada program studi ini semakin meningkat dan menyebar dari tahun ke tahun.	Program Studi yang memiliki mahasiswa yang unggul karena melalui seleksi yang ketat dan persingan yang ketat pula, berasal dari berbagai daerah di Indonesia Timur, maka Program Studi Magister ini dituntut harus mampu memberikan pelayanan akademik yang sangat baik, serta sistem pembelajaran yang maksimal sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan menuju Indonesia modern.
		Diharapkan dengan banyaknya peminat ini, dapat menciptakan atmosfer persaingan yang sehat sehingga dapat menghasilkan bibit calon mahasiswa baru yang sangat unggul.	Upaya untuk terus mengimplementasikan nilai budaya kualitas dan nilai-nilai kemaritiman merupakan tantangan tersendiri, kemudian disesuaikan dengan nilai keterpaduan yang divisikan Program Studi Magister Ilmu Hukum, sehingga dapat selaras.
		Selain itu lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum memiliki peluang lapangan kerja yang luas, terutama untuk dunia bisnis daen dunia profesi hukum yang semakin berkembang pesat baik domestik maupun internasional	Program studi terus meningkatkan kinerja untuk tetap menjaga kualitas luaran dan kepercayaan masyarakat yang sudah sangat tinggi terutama dalam menghasilkan luaran yang sangat kompeten dan profesional baik ditingkal wilayah, nasional dan internasional
		Sistem pengelolaan yang optimal juga merupakan modal dalam menarik minat mahasiswa berprestasi dan unggul untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini.	
I N T E R N A L			
STRENGTHS (S)	STRATEGI S-O	STRATEGI S-T	
Program magister ini sudah mendapat kepercayaan masyarakat dengan reputasi	1. Banyaknya calon peminat, akan sangat mendukung	1. Pengembangan suasana atmsfir akademik terus dipertahankan dan	

<p>akademik yang sangat tinggi, bukan saja karena tertua di wilayah timur Indonesia, tetapi juga memiliki alumni yang bertebaran dengan posisi-posisi sangat penting, mulai dari Gubernur, Bupati, Rektor, dan jabatan penting lainnya.</p>	<p>atmosfer kompetisi yang sehat, sehingga calon mahasiswa yang di recruit merupakan calon mahasiswa yang berasal dari bibit-bibit unggul.</p>	<p>ditingkatkan dalam menunjang proses pembelajaran dengan tetap mempertahankan kualitas.</p>
<p>Program Studi yang masih dalam garis koordinasi dengan Pascasarjana Universitas Hasanuddin, proses penerimaan Mahasiswa Baru pada Magister ini terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Namun dalam pelaksanaannya, Pihak Pascasarjana Unhas tetap melibatkan Program Studi yang bersangkutan dalam hal rekrutmen mahasiswa baru. Program Studi Magister Ilmu Hukum yang terkenal unggulan, proses rekrutmen mahasiswa baru dilakukan secara ketat, dengan mempertimbangkan kemampuan akademik yang terbaik di antara peminat.</p>	<p>2. Karena posisi program studi yang merupakan terbesar di Indonesia Timur, akan menjadikan lulusan memiliki lapangan kerja yang luas.</p>	<p>2. Peningkatan kualitas dan keahlian staf kependidikan terus diharus dilakukan untuk memelihara dan mempertahankan kondisi yang sudah kondusif saat ini.</p>
<p>Proses pembinaan mahasiswa, baik <i>hard skill</i> maupun <i>soft skill</i>, terus dilakukan demi terwujudnya kompetensi lulusan sebagaimana diharapkan. Selain itu, pengembangan prestasi mahasiswa juga terus dilakukan dengan dukungan baik moril maupun materil.</p>		<p>3. Evaluasi dan proses pembelajaran dalam pantauan satuan jaminan mutu ditingkat fakultas dan di PPS Unhas.</p> <p>4. Hubungan antar unit organisasi terus dikembangkan dalam rangka pembentukan komitmen yang searah dalam rangka pencapaian visi dan misi prodi magister ilmu hukum.</p>
<p>WEAKNESSES (W)</p>	<p>STRATEGI W-O</p>	<p>STRATEGI W-T</p>
<p>Distribusi calon mahasiswa</p>	<p>Kegiatan sosialisasi</p>	<p>Kepercayaan masyarakat</p>

<p>masih didominasi oleh calon mahasiswa yang didominasi berasal dari kawasan Indonesia Timur, hal ini menunjukkan bahwa Program Studi Magister terus berkiprah secara nasional internasional.</p>	<p>prodi tetap dipertahankan untuk menjadga kepercayaan stakeholder dalam berbagai pola termasuk secara multimedia, bukan saja secara internal akan tetapi tidak kalah pentingnya pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan profesi keilmuan hukum.</p>	<p>sebagai prodi yang kredibel terus dijaga dan dipertahankan melalui pembinaan staf dan pengembangan keahlian dosen dalam pembelajaran.</p>
<p>Pemanfaatan jaringan alumni yang sudah sangat luas itu sudah harus ditingkatkan dengan membangun jaringan komunikasi untuk sosialisasi.</p>	<p>Prodi terus meningkatkan dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi dan kalangan masyarakat profesional, untuk lebih menumbuhkan kepercayaan akan peran tanggung jawab prodi dalam pengembangan masyarakat.</p>	<p>Pembaharuan dan peningkatan materi acara yang terus dilakukan sering dengan perkembangan global dan tuntutan kebutuhan stakeholder yang berusaha begitu cepat dan dratis.</p>
<p>Peran serta alumni dalam proses pembangunan nasional dan pelibatannya dalam berbagai kegiatan bersama prodi terus diperlukan peningkatan dan pengembangan agar dapat menyentuh semua lapisan masyarakat terutama terhadap bidang-bidang baru yang memerlukan teori, perlindungan hukum di dalamnya.</p>	<p>Mengoptimalkan peranan alumni dalam hal melakukan sosialisasi program studi agar, peminatnya tidak hanya berasal dari Indonesia bagian timur saja. Program studi juga akan melakukan kerja sama dengan beberapa instansi terkait penerimaan mahasiswa baru.</p>	<p>Secara terus menerus melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja prodi dengan prinsip <i>good university governance</i>.</p>
		<p>Memberdayakan sumber daya dosen yang sangat potensial untuk meningkatkan peran aktifnya dalam pengembangan dan pelibatannya dalam penentuan kebijakan pemerintah dan masyarakat umumnya.</p>
		<p>Memperluas jaringan dan mengupayakan proses penerimaan mahasiswa yang tidak hanya terpusat pada satu tempat saja.</p>

KOMPONEN D

SUMBER DAYA MANUSIA

Universitas Hasanuddin sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia dan telah berhasil mendapat status terakreditasi A secara institusional, telah berdampak luas terhadap pengelolaan dan pengembangan prodi. Telah memiliki standar dan pedoman rekrutmen staf baik untuk tenaga edukasi maupun untuk staf kependidikan. Pola penerimaan staf disesuaikan dengan kebutuhan dan rasio jumlah mahasiswa pada setiap tahunnya. Disamping itu semua ketentuan dan standar rekrutmen telah ditetapkan melalui surat keputusan rektor pada setiap tahun rekrutmen.

Sistem rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan dalam lingkup Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dilakukan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berstatus ASN (PNS), sementara bagi dosen dan tenaga kependidikan dengan status Non PNS mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 8546/UN4.1/UM.07/2017 tentang Pengangkatan dan Pembinaan Karier Pegawai Universitas Hasanuddin Non Pegawai Negeri Sipil. Kebutuhan akan rekrutmen didasarkan pada rasio dosen dengan jumlah mahasiswa di samping itu juga menjadi pertimbangan dengan adanya dosen yang memasuki purna bakti dan meninggal dunia, maka sesegera mungkin dilakukan penggantian agar rasio dan keseimbangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan, tetap berimbang dan berjalan dengan baik.

Mekanisme rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan mengikuti secara konsisten semua ketentuan di atas dan dilaksanakan secara terbuka baik secara tertulis maupun melalui website www.unhas.ac.id. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dapat memberikan masukan dan pertimbangan terhadap kesesuaian dan kelayakan rasio jumlah mahasiswa dan tenaga pengajar, untuk dijadikan pertimbangan oleh pimpinan Fakultas Hukum Unhas

dalam mengajukan usul penerimaan dosen yang sesuai dengan program studi.

Melalui pengumuman seleksi penerimaan staf telah tercantum semua persyaratan dengan jelas demikian pula tahapan-tahapan proses rekrutmen. Tahapan pertama adalah pendaftaran dan seleksi berkas, yang dinyatakan lolos berkas dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya, yaitu tes kemampuan umum, tes kemampuan bidang, psikotes dan wawancara.

Universitas Hasanuddin menentukan Panitia Seleksi Penerimaan terdiri dari berbagai unsur yang berkompeten sesuai kebutuhan dan tahapan seleksi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor. Hasil seleksi yang telah melalui sejumlah tahapan tersebut sangat terbuka, ketat dan transparan, kemudian hasilnya diumumkan secara terbuka baik tertulis yang disampaikan langsung kepada yang bersangkutan, maupun melalui website www.unhas.ac.id.

Tabel 4.1.: Data Dosen Tetap Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah	Persentase (%)
1.	Asisten Ahli	-	-
2.	Lektor	13	21.31
3.	Lektor Kepala	17	27.86
4.	Guru Besar	31	50,81
	Jumlah	61	100 %

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar berkualifikasi sebagai Guru Besar. Dengan kondisi SDM tersebut tentunya merupakan potensi yang sangat besar bagi pengembangan prodi, yang akan melahirkan lulusan yang berkualitas pula. Proses pembelajaran pada Program Studi ini, juga dilakukan dengan memberikan wawasan dan penguasaan teori-teori hukum ditunjang dengan beberapa mata kuliah praktis.

Tabel 4.2. : Data Terkait Dosen Tidak Tetap Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

No.	Nama Dosen Tidak Tetap ⁽¹⁾	NIDN ⁽²⁾	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT ⁽³⁾	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Dr. Jan S. Maringka, S.H.,M.H.	-		-	SH MH Dr	S1 S2 S3 UNHAS	Jaksa Agung Muda Intelijen Kejakugung
2.	Prof. Dr. Indar, S.H.,MPH.	0010115301	10-11-1953	GB	S.H. MPH Dr. Prof	S1 UNHAS S2 Hawaii University S2 UNHAS	Kesehatan
3.	Prof. Dr.drg. A. Asunan Arsin, M.Kes.	0031126209	31-12-1962	GB	Dr M.Kes Dr. Prof	S1 UNHAS S2 UNAIR S3 UNHAS	Kesehatan
4.	Prof. Dr. Marianti Achmad Manggau	0019036702	19-03-1967	GB	Dr Prof	S1 UNHAS S2 UNHAS S3 Freie University	Farmasi
5.	Prof. Dr. Anwar Daud, SKM.,M.Kes.	0012106610	12-10-1966	GB	SKM. M.Kes Dr. Prof	S1 UNHAS S2 UNAIR S3 UNHAS	Kesehatan
6.	Prof. Dr. Amran Razak, SE.,M.Sc.	0002015701	02-01-1957	GB	SE. M.Sc. Dr. Prof.	S1 UNHAS S2 UI S3 UNHAS	Kesehatan

Tenaga kependidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah bagian dari tenaga kependidikan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam upaya meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya, Fakultas Hukum Unhas telah melakukan upaya-upaya, yaitu:

1. memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan diluar jam kerja atau pendidikan tidak bergelar seperti kemahiran sistem informasi (D1, D2, dan/atau D3 dengan mengalokasikan dana yang berasal dari pengembangan Sumber Daya Manusia Fakultas sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan.
2. mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti kursus/pelatihan baik di lingkungan Universitas Hasanuddin maupun di lembaga kursus yang ada di luar Universitas Hasanuddin, misalnya pelatihan Sistem Informasi Manajemen.
3. dalam hal peningkatan kompetensinya di bidang manajemen sumberdaya manusia dilakukan dengan memberi kesempatan dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen sumberdaya manusia berbasis kompetensi.
4. memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi dalam bentuk penempatan yang bersangkutan menduduki jabatan tertentu sesuai dengan jenjang karier dan kompetensinya.

ANALISIS SWOT

E K S T E R N A L I N T E R N A L	OPPOURTUNITIES (O)	THREATS (T)
	<p>Sumber daya dosen prodi sudah sangat memadai sebagian besar berkualifikasi guru besar dan seluruhnya doktor, merupakan peluang bagi prodi untuk melakukan pengembangan pola pengelolaan dan pembelajaran. Sistem rekrutmen dilakukan secara terbuka, teransparan, dan terukur melalui sistem dan mekanisme yang terdokumentasi dengan sangat baik dan profesional, merupakan kesempatan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan prodi. Untuk pengembangan sumber daya manusia sangat terbuka peluang untuk dimanfaatkan oleh dosen dengan dukungan penuh oleh tenaga pendidik baik di dalam maupun di luar negeri sangat terbuka dengan dukungan dana beasiswa yang selalu tersedia di Dirjen Dikti Kemendiknas. Kesempatan tersebut adalah peluang yang terus harus dimaksimalkan, segenap tenaga pengajar karena ketidaksiapan dan ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan-persyaratannya, terutama kemampuan penguasaan bahasa asing yang diperlukan.</p>	<p>Tingkat persaingan yang semakin ketat dan terbuka membutuhkan kesiapan jiwa dan keahlian yang relevan. Program studi dengan sistem pengelolaan yang baik, profesional dan modern sudah menjadi keharusan yang harus dipersiapkan dengan dukungan sarana dan prasarna serta dengan sistem IT yang termutakhir.</p> <p>Tuntutan akan ketersediaan sumber daya yang bermoral dan berkeahlian tinggi di bidang hukum, sudah menjadi kebutuhan masa kini bersesuaian dengan dampak globalisasi yang membutuhkan profesionalitas dan akuntabilitas.</p>

	<p>Kesempatan untuk menghasilkan karya-karya ilmiah bagi tenaga pengajar juga sangat terbuka Kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan wawasan akademik bagi tenaga pengajar terutama untuk mengikuti kegiatan ilmiah baik nasional maupun internasional yang didukung penuh oleh pimpinan program studi.</p>	
STRENGTHS (S)	STRATEGI S-O	STRATEGI S-T
<p>Hampir keseluruhan dosen yang mengajar berasal dari Universitas Hasanuddin berkualifikasi maksimal, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar. Keseluruhan dosen yang dimiliki Program Studi Magister adalah 61 orang dan beberapa orang dosen yang merupakan dosen tidak tetap. Selain itu dosen tetap yang mengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum didominasi Guru Besar. Hal ini merupakan potensi besar yang akan menjadikan Program Studi Magister sebagai Program Studi yang mampu mencetak keluaran-keluaran handal dalam bidang Ilmu Hukum, profesional dan bermoralitas tinggi dalam bidang ilmu hukum pada umumnya.</p>	<p>Meningkan hubungan kerjasama dengan sejumlah universitas nasional dan luar negeri terutama <i>visiting professor</i>, dan post doktor, secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa asing bagi pengajar prodi. Melakukan kerja sama dengan lembaga pelatihan bahasa untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing yang dimiliki dosen pengajar pada program studi. Mendukung Dosen pengajar mengikuti kegiatan ilmiah baik nasional maupun Internasional</p>	<p>Meningkatkan peran dan keahlian dosen dalam bidang penelitian, dan penulisan buku dengan pusbilikasi nasional dan internasional. Peningkatan kerjasama penelitian terpadu dengan beberapa perguruan tinggi nasional dan internasional. Demikian pula dengan pemerintah Indonesia terutama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya pembangunan.</p>

WEAKNESSES (W)	STRATEGI W-O	STRATEGI W-T
<p>Meskipun pola dan sistem rekrutmen sumber daya pengajar dan staf kependidikan telah memiliki standar/pedoman yang sangat jelas dan transparan. Namun pengendaliannya masih terpusat di universitas dan Kemendiknas, sehingga kualifikasi dan jenis keahlian yang dibutuhkan program studi untuk diterima terkadang tidak terpenuhi, demikian untuk tenaga staf kependidikan semuanya dikendalikan universitas yang terkadang kurang memperhatikan keahlian yang dibutuhkan oleh program studi, sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian dan pembinaan untuk tugas yang diembannya. Secara konseptual sistem pembinaan dan pengembangan sumber daya pengajar dan staf kependidikan telah terprogram dengan baik dan sangat jelas. Prodi terus memerlukan strategi yang sangat baik untuk mempertahankan kondisi yang ada</p>	<p>Sistem rekrutmen tenaga pengajar dan staf kependidikan dilakukan secara terbuka dan dengan spesifikasi keahlian yang jelas sesuai kebutuhan. Untuk memenuhi kurangnya kualifikasi yang dimiliki oleh dosen pengajar pada program studi, maka pimpinan akan melakukan perluasan jaringan kerja sama dalam kaitannya dengan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan bidang keahlian tenaga pengajar yang bersangkutan.</p>	<p>Pengembangan soft skill dosen terus harus dilakukan terutama dalam pengembangan materi ajar dan sistem pembelajaran. Demikian pembinaan untuk staf kependidikan untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanannya, diperlukan strategi khusus dan terprogram.</p>

<p>dengan pembinaan berlangsung secara bertahap namun masih tetap berkesinambungan. Pembinaan dan support oleh pimpinan proram studi kepada sumber daya pengajar telah berjalan dengan sangat baik, terutama untuk peningkatan soft skill dibidang pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Namun sepanjang kebijakan dari sisi pendanaan masih terus harus dikembangkan. Sehingga produktivitas kinerja untuk membuahakan hasil karya ilmiah telah berlangsung dengan baik.</p>		
--	--	--

KOMPONEN E

KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK

1. Kurikulum

Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan kompetensi lainnya yang mendukung tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi.

a. Kompetensi Utama

1. Memiliki kemampuan berpikir kritis akademis dan mampu melakukan penelitian yang menunjang pengembangan teori.
2. Memiliki kemampuan meningkatkan pelayanan profesional melalui penelitian dan pengembangan ilmu hukum.
3. Memiliki kemampuan mengembangkan profesi dalam spektrum yang lebih luas dalam ilmu maupun antar profesi.
4. Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dalam masyarakat, dan dengan penalaran ilmiahnya dapat mengajukan alternatif pemecahan masalah

b. Kompetensi Pendukung

5. Menguasai ICT dalam pengembangan kompetensi keilmuan
5. Mampu Berbahasa Inggris dan bahasa asing lainnya sebagai sarana pengembangan keilmuan.

c. Kompetensi Lainnya

1. Lulusan yang berfikir objektif, logis, kritis, dan sistematis;
2. Lulusan yang berperilaku santun, jujur, dan penuh integritas;
3. Lulusan yang bertindak cerdas, arif, bermoral, dan bertanggung jawab dalam bekerja dan berkarya;
Lulusan yang memiliki komitmen menegakkan hukum yang berintikan keadilan.

5. Peninjauan Kurikulum Dalam Lima Tahun Terakhir

Sejak Tahun 2016 sampai 2018 telah dilakukan Peninjauan kurikulum sebanyak 1 kali yaitu kegiatan Penyelarasan Kurikulum yang dilakukan pada tahun 2018. Penyelarasan kurikulum ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 di Fakultas Hukum Unhas, Penyelarasan kurikulum ini dilakukan dengan langkah pertama yaitu menyesuaikan kurikulum yang ada dengan kurikulum yang baru yang telah ditetapkan oleh kemenristekdikti, dengan membentuk tim untuk Ilmu Hukum, Tim tersebut melakukan peninjauan dengan mengkaji kurikulum yang ada, kemudian diselaraskan dengan SN Dikti. Selanjutnya setelah dilakukan pengkajian, kemudian diadakanlah lokakarya penyelarasan yang dihadiri oleh Pimpinan Fakultas, Para Dosen Pengampu mata kuliah, *stakeholders* dan pengguna lulusan

4. Struktur Kurikulum

Beban studi program magister bagi peserta sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selamalamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat (Kepmendiknas No. 232/U/2000).

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 2784/UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Magister Universitas Hasanuddin. Pasal 8 ayat (4) bahwa Kurikulum Program Magister memuat beban studi minimal 36 SKS dan maksimal 42 SKS, terdiri atas:

- a. Mata kuliah wajib program studi sebanyak 6 sampai 9 sks
- b. Mata kuliah pilihan pendukung keahlian/peminatan sebanyak 10 sampai 13 sks
- c. Seminar proposal penelitian tesis diberi bobot 2 sks
- d. Seminar hasil penelitian tesis diberi bobot 4 sks
- e. Penerbitan (*status accepted*) minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang terkait dengan tesis pada jurnal internasional atau jurnal terakreditasi nasional

- sebagai penulis pertama yang dapat didampingi oleh pembimbing utama dan atau pembimbing pendamping diberi bobot 5 sks; dan
- f. Tesis dan ujian tesis diberi bobot 9 sks

Merujuk pada peraturan rektor di atas maka jumlah sks yang harus dipenuhi oleh mahasiswa program Magister Ilmu Hukum adalah 36-42 sks, **Mata Kuliah Wajib maksimal 9 sks, mata kuliah keilmuan maksimal 13 sks, Seminar Proposal, seminar hasil, penerbitan artikel ilmiah, dan Ujian Tesis sejumlah 20 Sks.**

5. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

a. Mekanisme monitoring Perkuliahan

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 1870/HO4/P/2009 tentang Peraturan Akademik, Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 18371/H4/PP./2011 tertanggal 7 Oktober 2011, terakhir diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 2784/UN4.1/KEP/2018 tentang Penyelegaraan Program Studi Magister, Penyelenggaraan perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum dilakukan monitoring dengan baik. Setiap semester dijadwalkan untuk 16 kali tatap muka/sesi, termasuk Ujian Akhir Semester. Setiap mata kuliah diasuh oleh minimal 2 (dua) orang dosen, salah seorang selaku Penanggungjawab mata kuliah. Lama waktu perkuliahan untuk setiap sesi ditentukan berdasarkan bobot SKS setiap mata kuliah, dengan ketentuan bahwa setiap 1 sks sama dengan 50 menit.

Mekanisme monitoring perkuliahan dilaksanakan sejak awal perkuliahan sampai dengan Ujian akhir, dengan menggunakan instrumen monitoring sebagai berikut:

- a. Daftar Hadir Dosen
- b. Materi kuliah yang disampaikan dosen setiap kali tatap muka
- c. Daftar hadir mahasiswa
- d. Materi soal ujian dan/atau tugas-tugas yang diberikan kepada

mahasiswa.

Pada saat awal perkuliahan, dosen diwajibkan untuk menyampaikan Garis-garis Besar Rencana Pembelajaran (GBRP), sekarang Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah kepada mahasiswa, Kontrak Perkuliahan, dan bahan-bahan kuliah berupa bahan ajar, *power point* baik dalam bentuk *hardcopy* ataupun *softcopy* selama perkuliahan berlangsung.

Kehadiran mahasiswa dalam setiap mata kuliah minimal 80%, dan frekuensi perkuliahan minimal 80%. Monitoring kehadiran dosen dan mahasiswa dilakukan dengan memeriksa presensi/daftar hadir dosen dan mahasiswa. Berdasarkan hasil monitoring frekuensi perkuliahan selama penyelenggaraan Program Studi, hampir semua mata kuliah memenuhi frekuensi perkuliahan selama 16 sesi (termasuk ujian akhir semester).

Berdasarkan Peraturan Rektor di atas, hasil monitoring perkuliahan setiap minggu, dan evaluasi atas monitoring dilakukan secara berkala, yaitu pertengahan semester dan/atau diakhir semester. Hasil monitoring perkuliahan yang dilakukan oleh Program Studi disampaikan kepada dosen, khususnya kepada dosen yang belum memenuhi frekuensi mengajar. Program Studi memberikan kesempatan dosen yang bersangkutan memberikan kuliah tambahan di luar jadwal yang telah ditentukan. Mengenai waktu pelaksanaannya, ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa. Monitoring terhadap materi perkuliahan dilakukan dengan cara mengecek kesesuaian antara materi kuliah yang disajikan untuk setiap sesi dengan GBRP/RPS mata kuliah yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan dengan melihat daftar hadir dosen dan materi yang disajikannya setiap kali tatap muka.

Evaluasi akhir mahasiswa dilakukan oleh dosen dengan memberikan ujian tertulis dan tugas perorangan. Untuk kelancaran pelaksanaan ujian akhir semester, Program Studi menjadwalkannya selama 1 (satu) minggu dan dosen diwajibkan mengawasi mata kuliah yang diasuhnya. Pengawasan pelaksanaan ujian akhir semester, dilakukan oleh Tim Pengawas yang di SK-kan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Penelitian Tesis

a. Ketersediaan Panduan

Pembimbingan penelitian tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dilakukan berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Buku Pedoman tersebut telah disosialisasikan kepada mahasiswa, para dosen, dan telah dilaksanakan secara konsisten. Pedoman tersebut dapat diperoleh pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.

b. Kebijakan Pembimbingan

Penelitian tesis merupakan kewajiban akademis yang harus diselesaikan oleh mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum. Untuk menjamin kualitas proses dan hasilnya, maka diatur dalam suatu kebijakan bahwa setiap mahasiswa yang sedang menyusun tesis harus dibimbing oleh 2 orang pembimbing yang memiliki gelar akademik minimal doktor dengan kompetensi keilmuan yang sesuai dengan Judul Tesis serta ketersediaan waktu. Penetapan Dosen sebagai pembimbing mempertimbangkan jumlah bimbingan baik di tingkat Sarjana, Magister maupun Doktor, sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c. Mekanisme Penunjukan Pembimbing dan Mahasiswa Bimbingan

Penunjukan pembimbing tesis dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 18371/H4/PP.25/2011, tanggal 7 Oktober 2011, diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 2784/UN4.1/KEP/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Magister).

Berdasarkan pedoman tersebut, penunjukan pembimbing tesis ditetapkan oleh Dekan dengan Surat Keputusan atas usulan dari Ketua Program Studi berdasarkan hasil Rapat antara Ketua Program Studi, Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas, serta Wakil Dekan bidang

akademik, pengembangan, Riset dan Inovasi. Selanjutnya penunjukan mahasiswa bimbingan didasarkan atas judul usulan penelitian tesis yang akan diteliti dengan kompetensi pembimbing.

d. Proses Pembimbingan

Proses pembimbingan penyusunan tesis dilakukan oleh dosen pembimbing dengan mekanisme yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 18371/H4/PP.25/2011, tanggal 7 Oktober 2011, diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 2784/UN4.1/KEP/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Magister). Proses pembimbingan pada tahap awal dilakukan oleh Pembimbing Pendamping terkait dengan Teknis dan Sistematika Penulisan. Jika Pembimbing Pendamping telah selesai dan menyetujui, maka selanjutnya pembimbingan dilakukan oleh Pembimbing Utama terkait substansi dan metode penelitian.

Selama proses pembimbingan, mahasiswa harus menyertakan Jurnal Konsultasi pada setiap pembimbingan yang akan diisi dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing berkaitan dengan catatan berupa saran perbaikan, petunjuk, sehingga pembimbing dan mahasiswa dapat mengetahui perkembangan dan kemajuan (*progress*) penyusunan tesis yang bersangkutan. Proses pembimbingan akan berakhir apabila tesis telah diuji dan mahasiswa telah memperbaiki saran perbaikan yang diajukan oleh Penguji Tesis dalam pelaksanaan ujian tesis (apabila ada).

ANALISIS SWOT

I N T E R N A L	E K S T E R N A L	OPPOURTUNITIES (O)	THREATS (T)
	<p>Dengan posisi kampus Universitas Hasanuddin yang mengelola program studi Magister Ilmu Hukum yang sangat strategis dan salah satu perguruan tinggi terbaik di luar wilayah Pulau Jawa, memberikan peluang tersendiri yang sangat baik bagi calon mahasiswa untuk meraih prestasi di perguruan tinggi ini. Dengan tingkat kompetisi yang sangat selektif untuk diterima sebagai mahasiswa menjadi peluang yang terbuka untuk melahirkan generasi bangsa yang berbasis penguasaan keterpaduan ilmu hukum beserta keterampilan hukum yang memadai pula.</p>	<p>Sistem pengelolaan program studi yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern antara lain profesional, transparan, akuntabel, dan prediktibility, telah menjadi kebutuhan mendasar dalam sistem pengelolaan institusi, sehingga memerlukan daya respons dan antisipasi yang tinggi terutama dalam menghadapi persaingan modern dan global. Penggunaan dan penguasaan teknologi informasi dalam perkembangan dewasa ini sudah tidak terhindarkan lagi, bukan hanya dalam konteks sistem sarana dan prasarana pendidikan, namun tidak kalah urgennya juga adalah kemampuan para civitas akademika dan tenaga pendukung lainnya untuk memahami dan menguasai IT tersebut.</p>	
STRENGTHS (S)	STATEGI S-O	STRATEGI S-T	
<p>Kurikulum yang dimiliki Program Studi Magister Ilmu Hukum, merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi. Selain itu sistem pembelajaran yang diterapkan juga merupakan</p>	<p>Melakukan kerja sama dengan <i>Stakeholder</i> untuk meningkatkan kualitas kurikulum yang di miliki Program Studi.</p>	<p>Melakukan lokakarya secara berkala, yakni setiap 2 tahun sekali. Melakukan koordinasi tiap semester dengan dosen pengajar, untuk mengidentifikasi</p>	

<p>sitem pembelajaran <i>Student Center Learning</i>. Agar dapat menjamin evaluasi yang berdampak positif, Program Studi Magister Ilmu Hukum Unhas senantiasa melibatkan <i>Stakeholder</i> dalam upaya melakukan evaluasi terhadap kutikulum hal ini di maksdukan agar Kurikulum dapat di evaluasi dengan memperhatikan kebutuhan <i>Stakeholder</i>. Suasana pembelajaran yang di dukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, akan mampu mewujudkan pembelajaran yang nyaman, sehingga mahasiswa dapat memahami materi yang diberikan dengan baik.</p>		<p>permasalahan yang dihadapi sebagai bahan yang akan dikumpulkan dan dibahas bersama dalam lokakarya yang akan dilaksanakan 2 tahun sekali.</p>
<p>WEAKNESSES (W)</p>	<p>SRATEGI W-O</p>	<p>STRATEGI W-T</p>
<p>Pengelolaan administasi pendidikan dan sistem pendokumentasian aktivitas ilmiah untuk dosen sebanyak itu juga memerlukan sistem pengelolaan yang baik dan sistem administrasi yang baik pula. Kendala yang berpotensi menghambat sistem pembelajaran yang berbasis kompetensi adalah belum meratanya kemampuan dosen dalam penggunaan IT, masih ditemukan dosen yang masih menggunakan penyajian bahan ajar melalui OHP atau tanpa menggunakan alat bantu IT. Suatu hal yang selalui menjadi problem dalam penggunaan IT adalah daya</p>	<p>Melakukan kerjasama dengan <i>Stakeholders</i> untuk Melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan untuk meningkatkan mutu akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>Melengkapi sarana dan tenaga kepegawaian yang ditugaskan khusus untuk membantu dosen-dosen senior dalam hal penggunaan IT dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.</p>

<p>akses yang selalu bermasalah, meskipun telah disiapkan sejumlah perangkat sesuai dengan hitungan matematis akan mampu memberikan aksestabilitas yang memadai dan cepat, namun kenyataannya selalu tidak demikian.</p>		
--	--	--

KOMPONEN F

PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI

1. Pengelolaan Dana

Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam penyelenggaraan akademik, ketersediaan sarana dan prasarana perkuliahan, serta pengelolaan keuangan menjadi bagian dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penyelenggaraan anggaran dan pengelolaan dana diselenggarakan secara *ex-officio* oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas bersama-sama dengan para Wakil Dekan.

Setiap tahun anggaran, pihak Fakultas Hukum meminta kepada setiap Prodi (S1, S2, dan S3) dalam lingkup Fakultas Hukum Unhas untuk mengajukan perencanaan anggaran berkaitan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk prodi Magister Ilmu Hukum. Perencanaan anggaran tersebut kemudian disatukan dengan perencanaan anggaran pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pola pengelolaan keuangan semua Program Studi berada di bawah kewenangan Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya bersama beberapa pejabat keuangan lainnya.

Pengelolaan dana dilakukan dengan sistem administrasi keuangan, sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang sangat baik. Secara rutin dan terjadwal, evaluasi dan pemeriksaan pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik oleh auditor internal oleh Akuntan Publik, Inspektorat Jenderal, BPKP, dan BPK. Audit internal juga dilakukan oleh pihak Rektorat terutama penggunaan dana yang telah disahkan melalui RKAT.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Unhas saat ini sangat memadai, baik dalam hal jumlah, kualitas, dan ketersediaan teknologi yang menunjang proses pembelajaran. Penggunaan serta pemeliharaan dilakukan secara teratur dengan mengacu pada pedoman sebagaimana ditetapkan oleh pihak Universitas. Selain sarana dan prasarana

yang digunakan saat proses belajar mengajar di kelas, Progam Studi Magister Ilmu hukum juga sangat memperhatikan sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh tenaga pengajar, agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Berikut ini adalah data terkait ruang kerja tenaga pengajar.

Table 6.1. : Data Ruangan Tenaga Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Ruang Kerja Dosen	Jumlah Ruang	Jumlah Luas (m ²)
(1)	(2)	(3)
Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen	8	(a) 45
Satu ruang untuk 3 - 4 dosen	2	(b) 32
Satu ruang untuk 2 dosen	4	(c) 64
Satu ruang untuk 1 dosen (bukan pejabat struktural)	65	(d) 260
Total		(t) 401

Table 6.2. : Data Prasarana.

No.	Jenis Prasarana	Jumlah Unit	Total Luas (m ²)	Kepemilikan		Kondisi		Utilisasi (Jam/minggu)
				SD	SW	Tera wat	Tidak Terawat	
1.	Ruang Kuliah	25	2.300		-		-	40 jam/minggu
2.	Laboratorium Hukum	3	110		-		-	40 jam/minggu
3.	Perpustakaan (Ruang Baca)	1	144		-		-	48 jam/minggu
4.	Ruang Administrasi	22	1100		-		-	48 jam/minggu
5.	Ruang <i>Video Conference</i>	1	180		-		-	Tidak tetap
6.	Ruang <i>Moot Court</i>	2	360		-		-	40 jam/minggu
7.	Ruang Jurnal	1	53,5		-		-	40 jam/minggu
8.	Aula Baharuddin Lopa	2	360		-		-	40 jam/minggu
9.	Aula Ahmad Manggau	1	104,41		-		-	40 jam/minggu
10.	Ruang Promosi "Andi Zainal Abidin Farid"	1	259.09		-		-	20 jam/minggu
11.	Ruang Senat Fakultas	1	108		-		-	10 jam/minggu
12.	Ruang Ujian/Seminar	3	80		-		-	40 jam/minggu
13.	Ruang Gugus Penjaminan Mutu	1	48		-		-	40 jam/minggu

14.	Ruang Akreditasi	1	75.6		-		-	40 jam/minggu
15.	Rest Room	17	262.95		-		-	20 jam/minggu
16.	Law Book Store	1	35		-		-	40 jam/minggu
17.	Ruang Lembaga Kemahasiswaan	12	175		-		-	40 jam/minggu

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama

Tabel 6.3. Prasarana lain

No.	Jenis Prasarana Penunjang	Jumlah Unit	Total Luas (m ²)	Kepemilikan		Kondisi		Unit Pengelola
				SD	SW	Trawat	Tidak Trawat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Masjid	2	12.000		-		-	Fakultas dan Universitas
2.	Lapangan Sepak Bola	2	12.000		-		-	Fakultas & Universitas
3.	Lapangan Tennis	4	240		-		-	Universitas
4.	Lapangan Volley	2	100		-		-	Universitas
5.	Lapangan Takraw	1	50		-		-	Universitas
6.	Lapangan Bulutangkis	3	225		-		-	PB Unhas
7.	Rumah Sakit	2	80.000		-		-	Universitas
8.	Lapangan Basket	3	225		-		-	Universitas
9.	Lapangan Volley Pasir	1	200					Universitas
10.	Lapangan Soft Ball	1	2400					Universitas
11.	Lapangan Tembak	1	64					Universitas
12.	Lintasan Atletik	1	3200					Universitas
13.	Kolam Renang	1	100		-		-	Universitas
14.	Olahraga Air & SAR	2	30.000					Universitas
15.	Panjat Dinding	2	60					Fakultas & Universitas
16.	Arena Joging & Sepeda Santai	1	20.000					Universitas
17.	Kantin	2	220		-		-	Fakultas & Pascasarjana
18.	Lab. Komputer	1	36					Fakultas
19.	Lapangan Parkir	3	600					Fakultas
20.	Gazebo	8	64					Fakultas
21.	Asrama Mahasiswa	24	40.000					Universitas
22.	Rusunawa	5	40.000					Universitas

23.	Kebun Buah Naga	1	10.000					Universitas
24.	Kebun Jati Putih	1	20.000					Universitas
25.	Taman Satwa	1	40.000					Universitas
26.	Bengkel Workshop	1	7.500					Universitas
27.	Percetakan Lephass	1	7.000					Universitas

Keterangan:

SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

Selain sarana prasarana sebagaimana di maksud di atas, Program Studi Magister Ilmu Hukum juga melakukan pengembangan kepustakaan agar dapat menunjang proses pembelajaran mahasiswa serta mengupayakan keterpaduan penguasaan mahasiswa akan ilmu hukum. Tentunya dalam rangka pencapaian keterpaduan tersebut, haruslah ditunjang oleh literature yang banyak dan akses yang luas terhadap jangkauan mahasiswa akan keingintahuannya terkait bidang ilmu hukum. Perpustakaan yang tersedia di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, merupakan perpustakaan yang dapat di akses oleh civitas akademika Universitas Hasanuddin dan khalayak umum. Perpustakaan ini memuat banyak buku terkait bidang ilmu hukum, termasuk di dalamnya adalah buku-buku terkait ilmu hukum.

Table 6.4. : Data Terkait Ketersediaan Bahan Bacaan Pada Perpustakaan Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

Jenis Pustaka	Jumlah Judul	Jumlah Copy
(1)	(2)	(3)
Buku teks	6.657	9.819
Jurnal Nasional yang terakreditasi Dikti/LIPI	124	
Jurnal Internasional	14	55
Majalah Hukum	81	193
Prosiding	12	12
Skripsi	4.202	4202

Tesis	487	487
Disertasi	228	479
TOTAL	11.805	15.247

3. Sistem Informasi

Upaya yang dilakukan oleh Prodi Magister Ilmu Hukum untuk mengembangkan kualitas pendidikan bagi para mahasiswa adalah dengan meningkatkan kualitas teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut mutlak diperlukan untuk mempercepat dan mempermudah proses operasional belajar dan mengajar. Usaha tersebut di atas telah diwujudkan dengan dukungan komitmen dari pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang menaungi secara langsung Prodi Magister Ilmu Hukum, baik berupa dana maupun kebijakan, antara lain meliputi perbaikan dan peningkatan fasilitas *Hardware*, jaringan LAN, *software*, dan fasilitas internet.

Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas yang baik tersebut telah menciptakan peningkatan proses pembelajaran pada Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sistem informasi dan berbagai fasilitas, yaitu:

1. Komputer PC

Setiap ruangan perkuliahan dilengkapi dengan Personal Computer (PC) lengkap yang terkoneksi dengan LCD *Projector* untuk dipergunakan oleh dosen dalam proses perkuliahan. PC juga menjadi *hardware* utama di laboratorium hukum, di mana laboratorium hukum mahasiswa berpraktek secara praktis melatih keterampilannya membuat dokumen-dokumen hukum.

2. LCD

LCD yang digunakan berupa WPS. LCD ini dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar yang sudah tersedia secara permanen di setiap ruang kuliah.

3. Website

Sebagai media layanan data dan informasi baik publik maupun civitas akademika (Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa) melalui situs lawfaculty.unhas.ac.id yang berisi: warta *online*, informasi tentang fakultas, data dosen dan tenaga kependidikan, manajemen asset, serta data akademik mahasiswa.

4. Koneksi internet

Akses poin untuk internet sudah tersedia pada masing-masing unit kerja mulai dari pimpinan, staf, dosen dan tenaga kependidikan sudah bisa menggunakan koneksi internet untuk mencari informasi. Jaringan **Wireless**, saat ini terpasang di seluruh gedung dan dapat diakses diseluruh area dalam lingkungan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unhas.

5. Wifi zone (hot spot)

Untuk mengakses layanan internet mahasiswa yang memiliki *laptop* dapat melakukannya secara gratis dengan menggunakan *user account* dan *password* untuk masing-masing mahasiswa dan terjangkau di seluruh wilayah Fakultas. Oleh karena fasilitas IT sudah sangat memadai, sehingga seluruh pengolahan data telah dilakukan dengan komputerisasi (tidak ada pengolahan data secara *offline*).

6. Perpustakaan

Koleksi perpustakaan dapat diakses sepenuhnya oleh Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unhas baik yang terdapat di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pascasarjana maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Perpustakaan pada Fakultas Hukum (Ruang Baca) telah dikelola dengan komputer, begitu pula pada perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin, dapat mengakses secara langsung buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber pembelajaran lainnya, juga tersedia akses *online*

ANALISIS SWOT

I N T E R N A L	E K S T E R N A L	OPPOURTUNITIES (O)	THREATS (T)
	<p>Dengan sistem informasi yang telah dimiliki dengan kapasitas yang memadai, terpelihara dan dikelola dengan baik, merupakan sebuah peluang yang sangat baik untuk melakukan dan meningkatkan jaringan informasi akademik, kegiatan kemahasiswaan, dan pengabdian kepada masyarakat, demikian pula untuk akses informasi akademik di luar kampus, yang tersedia di jaringan internet tanpa batas.</p>	<p>Tantangan selanjutnya adalah peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran terutama gedung-gedung perkuliahan, ruang <i>meeting</i>, dan <i>mootcourt</i>, beserta berbagai alat pendukungnya. Selain memerlukan manajemen pengelolaan yang jelas dan terukur terutama keterediaan dana maintenancenya, tetapi juga harus disediakan sumber daya teknis yang memadai. Perlu pembinaan dan penambahan sumberdaya teknis listrik, elektronik, <i>cleaning service</i>, serta tambahan tenaga pustakawan.</p>	
STRENGTHS (S)	STRATEGI S-O	STRATEGI S-T	
<p>Pembiayaan yang diperoleh dari sejumlah sumber sangat mendukung terselenggaranya pengelolaan program studi yang efektif. Data menunjukkan selama tiga tahun terakhir dana pendidikan terus mengalami peningkatan, selain dana APBN dan PNPB juga masih terdapat sumber dana lain, yaitu dari hasil kerjasama kemitraan dengan sejumlah insitusi. Semenjak tahun 2010</p>	<p>Penggunaan dana akan dikelola secara lebih efisien dan tepat sasaran untuk dapat mencapai rencana kerja yang telah dianggarkan tiap tahunnya.</p>	<p>Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pengelolaan penggunaan dana. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana dalam menentukan skala prioritas.</p>	

<p>sesuai kebijakan Universitas Hasanuddin yang mengembalikan pengelolaan Program Pascasarjana yang bersifat monodisipliner ke fakultas masing-masing, hal ini juga mendapatkan tambahan dana pengelolaan institusi. Pengelolaan program studi selain telah didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang sangat baik, terawat, dan memadai. Juga didukung dengan alat atau perlengkapan yang memadai untuk berlangsungnya proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Semua ruang kuliah, ruang seminar, ruang meeting, video conference, moot court telah dilengkapi alat mulai dari AC, LCD, WiFi, dan computer. Fasilitas pendukung terwujudkan proses pembelajaran yang efektif adalah tersedianya sistem jaringan informasi yang berbasis IT telah tersedia dengan kapasitas yang memadai. Jaringan informasi ini telah ditangani sebuah unit kerja yang khusus, sehingga sistem operasionalisasinya dapat berjalan dengan baik, sekaligus menjadi tugas unit ini untuk mensosialisasikannya sistem dan penggunaannya ke semua civitas akademika.</p>		
<p>WEAKNESSES (W)</p>	<p>SRATEGI W-O</p>	<p>STRATEGI W-T</p>
<p>Ketersediaan dana yang</p>	<p>Mencari alternative sumber</p>	<p>Melakukan</p>

<p>sangat memadai setiap tahunnya dalam rangka pengelolaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Unhas, baik itu yang berasal dari APBN, PNBP, dana hibah, maupun yang berasal dari hasil kerjasama kemitraan. Kenyataannya belum bisa terserap secara optimal, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam RKAT. Belum terserapnya secara optimal dana pendidikan tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem pengelolaan keuangan yang terpusat. Selain itu pengucuran dana pada awal-awal tahun masih terbatas, sehingga sejumlah kegiatan yang terjadwal belum bisa berjalan. Akan tetapi, pada akhir tahun dana-dana tersebut barulah dikucurkan namun tetapi mengacu ke jadwal yang normal, sementara di akhir tahun kegiatan sangat padat, sehingga dana-dana tersebut belum bisa terserap optimal. Pengelolaan pembelajaran yang harus mengakomodasi semua program studi (S1,S2 dan S3), juga memerlukan kerja ekstra dan harus pula didukung dengan sumber daya yang memadai. Selain masih terdapat ruangan yang belum bisa dimaksimalkan fungsinya lantaran jadwal penggunaannya belum tersusun secara baik dan juga belum tersosialisasi dengan baik pula. Berkaitan</p>	<p>dana lain agar dapat menutupi kekurangan anggaran dalam pelaksanaan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>pemeliharaan yang baik terhadap sarana dan prasarana yang sudah ada. Melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang.</p>
--	--	--

<p>dengan pengelolaan ruang kuliah yang belum diikuti dengan petugas tetap yang bertanggung jawab atas penggunaan, kebersihan, dan pengamanan fasilitas yang terdapat didalamnya, hal ini masih perlu mendapatkan perhatian, karena beberapa tahun terakhir masih sering terjadi kehilangan alat pendukung pembelajaran antara lain LCD dan Warless serta perlengkapan koneksi jaringan, dan lain sebagainya.</p> <p>Hal lain yang tidak kalah pentingnya yang perlu mendapatkan perhatian dari pengelola program studi adalah <i>maintenance</i> untuk semua fasilitas pembelajaran, hal ini belum berjalan secara optimal. Penguatan komitmen staf terhadap tugas dan tanggung jawabnya masih menjadi problem tersendiri untuk diantisipasi penanganannya ke depan.</p>		
---	--	--

KOMPONEN G

PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

Program Studi Magister Ilmu Hukum akan senantiasa memberikan dukungan terhadap Penelitian dosen atau mahasiswa yang memberikan dampak pada peningkatan produktivitas, kesejahteraan, dan mutu lingkungan. Selama ini penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap Program Studi Magister Ilmu hukum Unhas mempunyai manfaat yang sangat positif terhadap pengembangan Ilmu Hukum.

Beberapa penelitian yang dilakukan merupakan bagian dari penelitian yang telah di agendakan sebelumnya, antara lain adalah Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi. Metode penelitian yang digunakan sangat bervariasi, hasil penelitian yang dihasilkan oleh para dosen maupun mahasiswa banyak di publikasikan pada jurnal ilmiah lokal maupun nasional.

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara berkesinambungan setiap tahunnya dengan perencanaan yang telah disesuaikan dengan kegiatan perkuliahan. Untuk dapat melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian yang efektif serta tidak mengganggu proses pembelajaran.

Dalam perencanaanya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini senantiasa di lakukan pada bulan Juni hingga bulan Agustus. Penempatan waktu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dikarenakan pada waktu tersebut tidak ada kegiatan proses belajar mengajar.

Perencanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini juga disesuaikan dengan kebutuhan yang kontekstual. Artinya penentuan tema yang akan diangkat pada penelitian harus merupakan tema yang sesuai dengan pedoman penelitian Fakultas Hukum Unhas, sedangkan tema untuk pengabdian pada masyarakat menyesuaikan dengan kebutuhan sasaran pengabdian. Penelitian yang melibatkan mahasiswa sering dilakukan. Hal ini dimaksudkan melatih kemampuan analisis mahasiswa yang dilibatkan, serta

memberikan pemahaman terkait keterpaduan Ilmu Hukum dengan bidang Ilmu lainnya.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dosen tetap pada Program Studi Magister Ilmu Hukum telah menghasilkan sebanyak 36 (Tiga puluh sembilan) penelitian. (Lihat tabel 7.1.1. pada Borang Program Studi). keseluruhan penelitian yang dilakukan oleh dosen, selain dipublikasikan pada Jurnal ilmiah Hasanuddin Law Reviuw (Halrev) ada juga beberapa tulisan yang di publikasikan oleh peneliti pada jurnal nasional dan Internasional.

Penelitian dosen atau mahasiswa yang memberikan dampak pada peningkatan produktivitas, kesejahteraan, dan mutu lingkungan pada Prodi Magister Ilmu Hukum.

ANALISIS SWOT

I N T E R N A L	E K S T E R N A L	OPPOURTUNITIES (O)	THREATS (T)
	<p>Adanya program Hibah Kompetisi dari DIKTI dapat meningkatkan kesempatan pelaksanaan penelitian. Demikian juga halnya dengan dana pelaksanaan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dengan terjalannya kerjasama dengan instansi pemerintahan dan Lembaga Negara seperti MK, MA dan Kementerian Luar Negeri semakin meudahkan mahasiswa untuk dapat terlibat langsung dalam melakukan penelitian. Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dapat dibiayai tidak hanya oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum. Hal ini akan lebih memudahkan dan memperbanyak karya ilmiah yang dapat dihasilkan.</p>	<p>Kemajuan akan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat sangat membantu dan memberikan kemudahan terhadap pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan haruslah senantiasa merupakan hal-hal baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat akan permasalahan yang harus segera diberikan solusi. Selain itu, untuk mendapatkan bantuan dana dari berbagai pihak, tentunya peneliti harus memiliki nilai jual usulan penelitian yang tinggi, hal ini menuntut para dosen agar membuat proposal penelitian yang memiliki kualitas tinggi.</p>	
STRENGTHS (S)	STATEGI S-O	STRATEGI S-T	
<p>penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap pada program studi magister Ilmu Hukum cukup banyak. sampai saat ini dosen yang telah melakukan penelitian adalah 36 dosen tetap yang terdaftar pada program studi magister ilmu hukum. selain dosen, tentunya penelitian yang dilakukan secara rutin oleh mahasiswa dalam bentuk</p>	<p>Memperluas jaringan hasil publikasi terutama pada jurnal yang berskala internasional Meningkatkan kesempatan bagi para dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Meningkatkan pengiriman hasil penelitian kepada media untuk di publikasi.</p>	

<p>tesis terus di lakukan pembinaan dengan sangat baik.</p> <p>Materi yang diangkat pada penelitian yang dilakukan oleh dosen, maupun penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk tesis, senantiasa merupakan penelitian dengan tema yang kontekstual dengan masalah-masalah hukum yang ada di masyarakat. agar dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa juga di publikasikan baik pada jurnal local maupun jurnal nasional.</p>		
<p>WEAKNESSES (W)</p>	<p>STRATEGI W-O</p>	<p>STRATEGI W-T</p>
<p>Banyaknya penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, menyebabkan upaya publikasi terhadap hasil penelitian tersebut sedikit mengalami hambatan. Demi terselenggaranya efektifitas dalam upaya publikasi karya ilmiah, Program Studi Magister Ilmu Hukum melakukan pengkajian terhadap hasil penelitian yang akan di publikasikan, yang memang berkaitan dan langsung menyentuh permasalahan hukum yang sementara di hadapai oleh masyarakat. Namun demikian, dalam waktu dekat Program Studi Magister Ilmu Hukum akan mengupayakan jurnal mandiri yang dikelola oleh</p>	<p>Saat ini sudah terdapat 2 jurnal yang dikelola pada tingkat fakultas yang diterbitkan setiap bulan, yakni jurnal amanna gappa dan jurnal Penelitian. Jurnal ini akan menjadi sarana yang efektif dalam mempublikasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.</p>	<p>Untuk lebih mengefektifkan publikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, maka jurnal amanna gappa dan jurnal penelitian akan diupayakan untuk memperoleh status akreditasi secara nasional.</p>

Program Studi, agar dapat menampung banyaknya karya ilmiah yang dihasilkan.		
---	--	--

ANALISIS SWOT ANALISIS ANTAR KOMPONEN

Dari segi **kekuatan (Strength)**, beberapa hal dapat dikemukakan sebagai kekuatan yang dapat ditonjolkan oleh program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Struktur dan mekanisme kerja organisasi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum telah terintegrasi dalam struktur organisasi Universitas Hasanuddin secara menyeluruh. Kepemimpinan telah dilaksanakan dengan mengutamakan, Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Responsibilitas, serta Kewajaran. Program studi Ilmu hukum memiliki visi, misi dan tujuan yang memiliki relevansi dengan Visi, Misi, dan Tujuan dari Universitas Hasanuddin sehingga dapat dirumuskan sasaran dan strategi yang berkesinambungan dan memiliki relevansi dengan Renstra yang dicanangkan oleh Universitas Hasanuddin. Program studi Magister Ilmu Hukum memiliki Pimpinan yang kompeten dalam bidang organisasi dan akademik yang dapat mengelola dengan efisien dan efektif sesuai visi, misi dan tujuan yang telah dibuat. Selain itu terdapat mekanisme evaluasi yang terbuka dalam bidang proses pembelajaran yang senantiasa dilakukan Questioner umpan balik dari Mahasiswa dalam setiap proses pembelajaran sehingga kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran dapat terukur. Sistem evaluasi personil dan anggaran secara berkala. Disamping itu juga telah diselenggarakan Sistem Penjaminan Mutu internal baik itu di Program studi Ilmu Hukum, maupun di Unhas sehingga hal ini merupakan kekuatan untuk mendorong peningkatan prestasi peserta didik pada Program Studi Ilmu Hukum. Hal ini terbukti dengan peningkatan rata-rata IPK (3.80) mahasiswa tiap semester serta keberhasilan mahasiswa Fakultas Hukum Unhas menjuarai beberapa even di tingkat Nasional.

Kekuatan lain yang dapat ditonjolkan adalah berkaitan dengan sumber daya manusia, khususnya dosen pengajar program studi Magister Ilmu Hukum yang keseluruhannya telah bergelar Doktor Ilmu Hukum dan memiliki sertifikat pendidik. Selain itu 31 dari 61 dosen pengajar telah berstatus sebagai guru besar. Begitu pula dengan tenaga kependidikan yang ditunjang

Tenaga kependidikan sebanyak 33, tenaga pustakawan sebanyak 43 orang, tenaga laboratorium/teknis sebanyak 5 orang.

Sarana dan prasarana yang tersedia pada Program Studi Ilmu Hukum sangat memadai, baik dari segi kuantitas, kualitas serta kapasitasnya. Khususnya terkait dengan kebutuhan mahasiswa untuk mendukung kegiatan proses pembelajaran pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Pada Program Studi Ilmu hukum memiliki fasilitas *LAN*, *Wifi* dan *Website*, serta sarana *Video Conference* yang dikelola secara terpadu sehingga memudahkan civitas akademika mengakses informasi terbaru dalam dan luar negeri.

Dalam hal pendanaan, Program Studi Magister Ilmu Hukum mendapatkan dan mengelola banyak sumber dana yang bersumber dari SPP Mahasiswa, Sponsor dari berbagai Instansi, dan perusahaan-perusahaan Luar Unhas, serta Alumni yang menduduki beberapa jabatan penting. Dengan sistem penerimaan dan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang terpusat, namun dengan alokasi pendanaan yang pengelolaannya otonom, maka program Studi Magister Ilmu Hukum terjamin keberlanjutannya.

Dari segi kelemahan (Weakness), ada beberapa hal yang perlu di garis bawahi pada Program Studi Ilmu Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin untuk dicermati :

Sebagian besar dosen yang mengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Unhas, mengajar pula pada beberapa Universitas Swasta yang ada di Makassar dan luar Sulawesi, begitu pula pada beberapa Fakultas yang ada di Lingkungan Universitas Hasanuddin, menjadikan beban mengajar Dosen cukup tinggi, sehingga tugas Dosen lebih fokus pada bidang pengajaran. Sedangkan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi menjadi agak terabaikan. Belum adanya program yang sistematis dan terstruktur di tingkat lembaga mengenai peningkatan pendidikan formal para dosen tetap dan juga kesempatan pengembangan keilmuan dosen dan tenaga kependidikan belum dilakukan secara merata dan terbuka. Selain itu penyelenggaraan workshop, training, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknik

pembelajaran dan pengembangan para Dosen dengan sistem SCL belum diikuti oleh seluruh Dosen. Di lain pihak, ada kelemahan dalam penyebaran informasi penerimaan calon mahasiswa baru secara merata di berbagai daerah dengan menggunakan system *on-line* terutama di pelosok-pelosok yang belum dapat mengakses jaringan internet.

Dari Segi Peluang (opportunities), dapat dijabarkan sebagai berikut:

Berkaitan dengan sumber daya manusia, dosen pengajar pada Program studi Magister Ilmu Hukum keseluruhannya merupakan Doktor Ilmu Hukum dan 34 diantaranya telah berstatus Guru Besar. Keadaan ini merupakan peluang yang sangat besar untuk prospek pengembangan Program Studi Ilmu Hukum ke depan. Selain itu Program Studi Ilmu hukum juga memiliki kerjasama dengan Pihak Luar Negeri seperti Universitas Utrecht di Netherlands (Belanda) dan Universitas Washington Amerika Serikat. Banyaknya tersedia peluang dari segi keilmuan, pembiayaan dan kerjasama/kemitraan baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri membuka kesempatan bagi dosen dan mahasiswa dalam rangka pengembangan ilmu, melanjutkan studi ataupun mengadakan penelitian yang terbuka dengan sistem informasi yang mudah dan cepat.

Adapun ancaman (threats) yang perlu diwaspadai adalah sebagai berikut:

Banyaknya program studi sejenis di Indonesia termasuk beberapa perguruan Tinggi Swasta yang telah mendapatkan status Akreditasi dari BAN Perguruan Tinggi sehingga kompetisi untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas menjadi semakin ketat. Program studi di luar Program Studi Magister Ilmu Hukum Unhas juga banyak menawarkan kemudahan dalam kelulusan dan proses belajar sehingga program Studi Magister Ilmu Hukum harus senantiasa bersaing namun tetap menjaga kualitas keilmuan yang ditawarkan. Strategi yang dapat diterapkan dengan senantiasa berupaya menonjolkan kekuatan dengan memperhatikan kelemahan yang ada, begitupun dengan melihat peluang yang tersedia, maka langkah strategi yang dapat dilakukan adalah:

1. Dengan memperhatikan kekuatan Sumber Daya Manusia (dosen dan tenaga kependidikan), sarana dan prasarana yang sangat memadai yang dimiliki Program Studi Ilmu Hukum, maka dimungkinkan dilakukan strategi pengembangan Program Studi Ilmu Hukum berupa peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar negeri, begitu pula dengan instansi-instansi yang ada. Hal ini sangat didukung pula dengan sistem informasi yang sangat memadai. Hal ini akan mendukung peningkatan mutu pembelajaran dan materi kuliah oleh dosen dalam melakukan penelitian dan pengembangan keilmuan. Bentuk kerjasama dan kemitraan Program Studi Magister Ilmu Hukum ini jika dimanfaatkan secara maksimal, akan membuka wawasan mahasiswa serta terbentuknya jaringan yang lebih luas dengan pihak-pihak di luar program studi.
2. Dengan melihat banyaknya program studi sejenis yang juga telah terakreditasi, Program Studi Magister Ilmu Hukum Unhas senantiasa melakukan pembenahan kurikulum secara periodik dan berkelanjutan yang dalam penyusunannya mengakomodasi kebutuhan akan adanya pengembangan ilmu di masa datang yang selaras dengan visi, misi, tujuan serta sasaran program studi.
3. Mengoptimalkan keterlibatan alumni dan *stakeholder* dalam kegiatan akademik dan non akademik, dimulai dari penyusunan kurikulum sehingga luaran (*out put*) dan *outcome* yang dihasilkan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan *stakeholder*.
4. Peningkatkan secara maksimal kinerja Audit Internal dan Eksternal dalam rangka menghasilkan monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Kepmendikbud RI Nomor 0206/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin
4. Kepmendiknas RI Nomor 192/O/1995 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin
5. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No. 3763/H4/P/2009 Tentang Kebijakan Akademik
6. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No. 1870/H4/P/2009 Tentang Peraturan Akademik
7. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No. 56/H4/PP/2011 Tentang Format Kurikulum Berbasis Kompetensi
8. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No. 777/H4/O/2011 Tentang Instrumen Monitoring Penyelenggaraan SCL
9. Manual Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
10. Organisasi unit penjaminan mutu akademik (UPMA) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
11. Kebijakan Akademik Fakultas Hukum Unhas
12. Rentra Universitas Hasanuddin 2011-2015
13. Rencana Operasional Universitas Hasanuddin